MUHAMMAD HANIF DHAKIRI

NU
Jimat NKRI, Jimat Islam Indonesia

PUSTAKA Pesantren

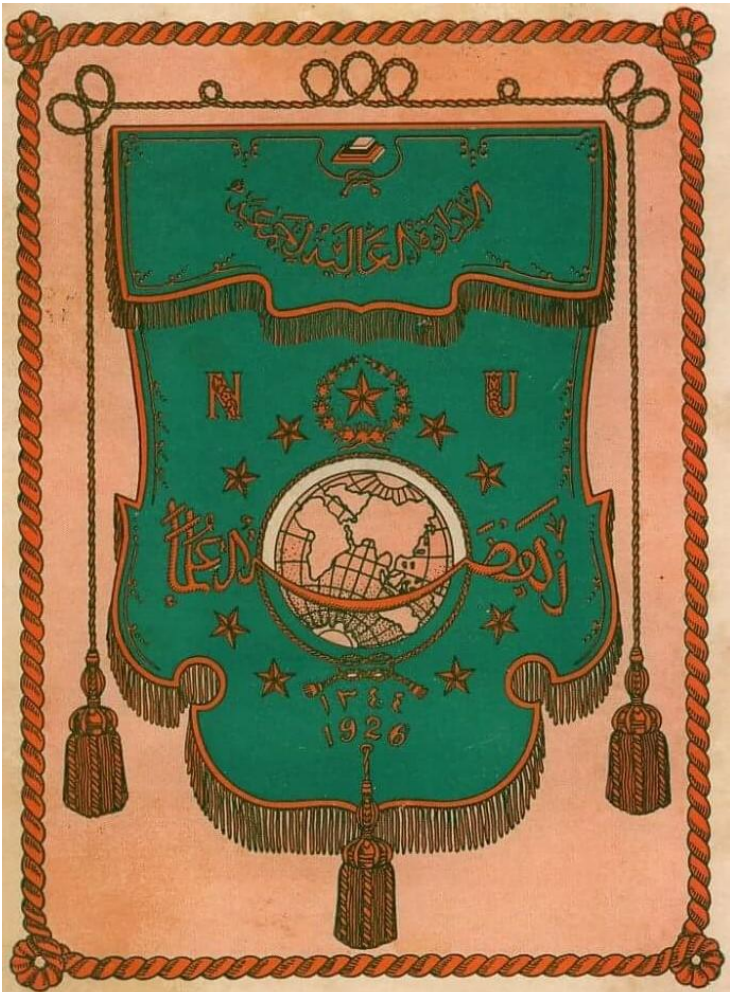

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

NU

JIMAT NKRI
JIMAT ISLAM INDONESIA

نهضة العلماء
N U

NU

JIMAT NKRI
JIMAT ISLAM INDONESIA

Muh. Hanif Dhakiri

NU: Jimat NKRI, Jimat Islam Indonesia
Muh. Hanif Dhakiri
© Pustaka Pesantren, 2013

xiv + 108 halaman; 12 x 18 cm
ISBN: 602-8995-44-4
ISBN 13: 978-602-8995-44-3

Pengantar: H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Editor: Umaruddin Masdar
Co-editor:
MF. Nur Huda Yusro & Lukman Bastomi
Layout: Rizal Mahmudi
Cover: Estikomo

Penerbit dan Distribusi:
Pustaka Pesantren
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
Faks.: (0274) 379430
http://www.lkis.co.id
e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan I: 2013

Percetakan:
PT. LKiS Printing Cemerlang
Salakan Baru No. 3 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
e-mail: lkis.printing@yahoo.com

TERIMA KASIH

Nahdlatul Ulama adalah pilar dan elemen penting dalam sejarah Indonesia, termasuk pilar utama tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai saat ini. NU bisa dikatakan pilar ketiga bangsa setelah UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

NU adalah kekuatan lahir batin bagibangsa ini yang tanpa cacat telah mendarmabaktikan dirinya untuk kesatuan dan kemajuan bangsa. NU lah yang yang bisa membentengi NKRI dari serangan kaum kiri, kaum liberal-kapitalis dan juga kelompok fundamentalisme Islam.

Tapi sayang, ada banyak kelompok yang tidak suka kepada NU, tidak senang melihat NU besar, bahkan ketidaksukaan itu dimanifestasikan secara struktural dan sistematis dalam suatu skenario politik untuk menyingkirkan NU. Untung saja NU dengan kekayaan tradisi dan peradabannya bisa

menjadi kelompok yang sangat mandiri, mempunyai daya tahan dan pertahanan yang kokoh, serta daya lentur yang membuatnya tetap eksis.

Buku ini mengelaborasi kekayaan dan kedalaman tradisi peradaban NU, kontribusinya untuk bangsa, serta berbagai upaya politik sistematis yang dilakukan pihak luar untuk menyingkirkan NU di semua sendi kehidupan bangsa. Diharapkan buku ini bisa menjadi pencerahan dan pegangan khususnya bagi kader NU sendiri agar tetap waspada.

Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman anggota F-PKB DPR RI, pengurus DPP PKB, pengurus DKN Garda Bangsa, para kiai dan kader NU yang telah memotivasi saya untuk menyelesaikan buku ini. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada H.A. Muhaimin Iskandar M.Si., Ketua Umum DPP PKB, yang telah berkenan memberikan kata pengantar buku ini serta memberikan dukungan total kepada saya untuk menyelesaikan buku ini agar bisa menjadi referensi yang berharga bagi bangsa dan generasi muda. Sejumlah sahabat dan pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini, terima kasih juga atas segala bantuan dan dukungannya.

Jakarta, 13 Maret 2010

MHD

NU dan TRANSFORMASI BANGSA

Oleh: A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum DPP PKB

Banyak pengamat yang keliru dan gagal memahami NU. Dengan cara pandang yang *western minded*, terkungkung oleh positivisme ilmu pengetahuan dan kedangkalan cara berpikirnya, mereka gagal memahami NU kecuali apa yang nampak di permukaan. Jadinya seperti yang dikatakan Snouck Hurgronje: "pengamat-pengamat telah gagal memahami NU, kecuali mereka yang mengamatinya secara seksama".

Karena tidak memahami tradisi NU secara benar, banyak pengamat kemudian terkecoh dan keliru menilai NU. Pengamat seperti Mochtar Naim, Arnold Brackman, Daniel Lev, Ernst Utrecht, Peter Polomka, Lance Castles dan Leslie Palmier, dan banyak pengamat "modernis" yang lain

memberi cap NU sebagai oportunis, jumud, mistis, dan stigma-stigma lain yang identik dengan keterbelakangan. Mereka tidak mampu melihat perubahan-perubahan sangat fundamental yang dilahirkan dari dinamika internal tradisi NU yang sifatnya bertahap dan di bawah permukaan.

Kenyataan bahwa sampai saat ini NU tetap eksis sebagai "ormas Islam terbesar di Indonesia" dan tetap menjadi tumpuan bagi banyak pemimpin yang ingin merebut atau mempertahankan kekuasaan, merupakan sedikit bukti bahwa NU memiliki daya tahan dan pengaruh luar biasa dalam setiap siklus kehidupan bangsa.

NU adalah ormas yang membangun pandangan dunianya di atas kekuatan tradisi Islam dan masyarakat yang ada. Tradisi yang dijaga dan dikembangkan NU secara terus-menerus itu meliputi tiga aspek. *Pertama*, khazanah peradaban Islam masa lampau (*legacy ot the past*). Seperti dikatakan Abdurrahman Wahid (1985), peradaban Islam memiliki kebesaran material yang diwariskan kepada dunia dalam bentuk legasi arsitektur penuh kemegahan (dari Masjid Pualam Biru di Turki hingga ke Taj Mahal di India); keagungan rohani yang dilestarikan dalam kepustakaan yang masih berjuta-juta dalam bentuk naskah tulisan tangan dan belum dicetak, serta dalam tradisi penurunan ilmu-ilmu dan nilai-nilai keagamaan dari generasi

ke generasi dengan hasil terpeliharanya kebulatan pandangan hidup kaum Muslimin hingga kini, dan kelengkapan yang ada pada masa lalu peradaban Islam yang dapat digunakan sebagai alat pengembangan peradaban Islam yang baru di masa depan.

Dalam tradisi NU, kebesaran khazanah peradaban Islam itu dilembagakan dalam kitab-kitab fiqih, gerakan tarekat dan dialog terus-menerus dengan realitas dan tradisi masyarakat setempat. Kesemuanya bersifat saling melengkapi sehingga ada dinamika internal dan dinamisasi masyarakat tiada henti.

Dengan kekayaan seperti itu, tradisi pemikiran NU bisa lebih terbuka, tidak kaku dan mempunyai kemampuan menyerap berbagai manifestasi kultural, wawasan keilmuan, dan nilai-nilai yang datang dari agama, kepercayaan dan peradaban lain. Dalam konteks demikian, nilai-nilai universal yang lahir dari berbagai peradaban disatukan menjadi prinsip-prinsip dasar kesejahteraan umat (*mabadi' khairi ummah*) yang memungkinkan terciptanya harmoni sosial dan kesejahteraan umum.

Kedua, tradisi berpikir fiqih dalam kerangka pemikiran mazhab. NU dikenal sebagai organisasi keagamaan yang secara fiqih berpegang pada salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, asy-Syafi'i dan Hanbali. Di samping itu NU juga merujuk pada

Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi dalam tarekatnya, serta kepada Abu Hasan al-asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam pemikiran tauhid atau teologinya.

Dengan tradisi keilmuan dan spiritualitas seperti itu, pemikiran dan sikap keberagamaan NU bisa terhindar dari pendakatan yang bersifat kaku, tunggal dan monolitik terhadap teks-teks suci yang juga berpengaruh dalam cara pandang terhadap realitas. Dengan merujuk kepada beberapa mazhab, pluralisme dan sikap toleran terhadap pandangan yang berbeda menjadi sesuatu yang *built in* atau terintegrasi secara utuh dalam tradisi NU.

Tradisi berpikir fiqih memang memungkinkan NU menjadi sangat kosmopolit, dalam arti terbuka dan sekaligus dinamis. Ketika bangsa atau masyarakat menghadapi suatu persoalan misalnya, NU akan bisa lebih arif dan dewasa memberikan solusi dan pemahaman terhadap persoalan itu berdasarkan pemikiran salah satu dari mazhab empat. Dengan sendirinya ada banyak alternatif yang bisa diberikan untuk dijadikan pegangan bersama.

Jika pendapat salah satu atau semua mazhab itu dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntunan zaman, atau jika fiqih dianggap kurang bisa dijadikan pegangan, maka NU menyediakan jalan keluar melalui teori-teori hukum

Islam (*usul al-fiqih*) dan kaidah-kaidah hukum agama (*qawaid fiqhiyyah*). Jadi selalu ada ruang sangga yang menampung dan sekaligus menjadi jawaban dari berbagai macam persoalan, sehingga jalan buntu bisa dihindari dan pemikiran-pemikiran ekstrem bisa dihilangkan. Dan setiap pemahaman dan solusi atas setiap persoalan selalu diorientasikan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan, sebagaimana menjadi tujuan dari diturunkannya ajaran Islam itu sendiri.

Ketika partai-partai Islam sudah menemui jalan buntu dalam mewujudkan Islam sebagai dasar negara (dalam perumusan dasar negara tahun 1945) dan mewujudkan negara Islam (dalam sidang-sidang Konstituante tahun 1958-1959), NU bisa memberi jalan keluar yang diterima semua pihak. Bagi NU, Indonesia sebagai "negara damai" (*dar as-sulh*) harus diterima dengan sungguh-sungguh. Pandangan ini didasarkan kaidah hukum *ma la yudraku kullu, la yutraku kulluh* (apa yang tidak bisa diwujudkan seluruhnya, jangan ditinggalkan unsur terpenting yang ada di dalamnya). Indonesia berdasarkan Pancasila melindungi dan memberi kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Itulah bagian terpentingnya. Sikap NU kemudian yang menerima NKRI berdasarkan Pancasila secara final juga merupakan manifestasi dari penerapan hukum agama (fiqih) dalam kehidupan bangsa.

Ketiga, tradisi masyarakat setempat berikut nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Dengan kedalaman pemikirannya yang bersumber pada unsur-unsur dinamis dari peradaban Islam di masa lalu, NU bisa berinteraksi secara dinamis dengan tradisi masyarakat yang ada. NU tidak pernah memurnikan atau membersihkan Islam dari tradisi dan kultur masyarakat sebagaimana gerakan modernisme Islam, karena hal demikian bukan saja bertentangan dengan kosmopolitanisme peradaban Islam, tetapi juga akan membuat keberagamaan menjadi kaku, kering dari nilai-nilai moral dan juga terasing dari sejarah masyarakat.

NU menempatkan Islam sebagai salah satu unsur yang membentuk atau menjadi pilar bangsa bersama-sama agama, kepercayaan dan tradisi yang ada di dalam Republik ini. Islam tidak diposisikan menyendiri di luar sejarah, tetapi menjadi bagian yang saling melengkapi (komplementer) bersama yang lain. Di sini ada kerendahan hati dan keterbukaan untuk saling belajar, memberi dan menerima (*take and give*), sehingga dinamisasi kehidupan bangsa menjadi sangat kental dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari struktur dalam masyarakat sendiri.

Dengan demikian, angapan bahwa NU adalah oportunis, jumud atau mundur sebenarnya

merupakan pandangan yang lahir dari penglihatan sepintas terhadap NU di permukaannya saja. Bukan suatu pandangan yang dalam dan seksama terhadap kekayaan tradisi yang dilestarikan dan dikembangkan oleh NU selama ini.

Melalui buku ini, Hanif Dhakiri membuktikan bahwa semua pemikiran dan sikap sosial atau politik yang dimanifestasikan dalam gerakan NU merupakan produk dari pandangan dunia yang bersumber dari khazanah peradaban Islam, tradisi berpikir serba-fiqih dan juga nilai-nilai luhur yang ada dalam kultur masyarakat setempat di mana NU berkembang di dalamnya. Karena itu, pemikiran dan sikap NU senantiasa memiliki legitimasi keagamaan, keilmuan, moral, dan juga kultural yang memungkinkannya bisa eksis dan mempunyai pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini.

Dengan kekayaan peradaban dan tradisi seperti itulah NU bisa tetap menjadi kekuatan utama yang terus mempengaruhi transformasi bangsa dari waktu ke waktu. Dan itu hanya bisa dipahami dan dilihat oleh mereka yang mampu membaca kedalaman tradisi NU dan dinamikanya secara sungguh-sungguh dan seksama.

Jakarta, 9 November 2013

DAFTAR ISI

Terima Kasih ~ v
Pengantar A Muhaimin Iskandar ~ vii
Daftar Isi ~ xiv

1. Hutang Budi Bangsa kepada NU, Pesantren dan Ulama ~ 1
2. Mengenal NU: Lahir Batin Indonesia ~ 17
3. Gerakan Sistemik Menyingkirkan NU ~ 27
4. Kegagalan Ideologi Liberal Anti-NU ~ 65
5. Karakter Elit-elit Indonesia Non-NU ~ 79
6. NU: Jimatnya NKRI, Jimatnya Islam Indonesia ~ 100

Tentang Penulis ~ 107

- 1 -

HUTANG BUDI BANGSA KEPADA NU, PESANTREN DAN ULAMA

Dalam kitab *Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah*, Hadratus Syaikh KH M Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa sejak pertama kali Islam masuk Indonesia, Islam yang berkembang adalah Islam yang bermazhab as-Syafi'i dan mengikuti tasawwufnya Imam Ghozali. Sudah sejak awal umat Islam Indonesia itu mencintai Ahlul Bait (keluarga dan keturunan Nabi Muhammad SAW), mempunyai tradisi ziarah kubur, mentradisikan *tabarruk* dan *tawassul*, dan selalu mengikuti para ulama.

Ajaran-ajaran seperti itulah yang kemudian dilestarikan dan dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang dipertahankan dalam kultur dakwah para kiai NU sampai sekarang. Islam ala NU, dengan demikian, sudah sejak lama jauh sebelum Indonesia merdeka telah memberikan kontribusi sangat fundamental dan menyeluruh terhadap kehidupan bangsa, baik dalam aspek keagamaan, kebudayaan, dinamika masyarakat, stabilitas bangsa serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tidak mengherankan jika seorang Snouck Hurgronje menyatakan bahwa "Islam tradisional di Nusantara (baca: NU) yang kelihatannya demikian statis dan demikian kuat terbelenggu oleh pikiran-pikiran ulama abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Tetapi perubahan-perubahan tersebut demikian bertahap-tahap, demikian rumit dan demikian dalam tersimpan. Itulah sebabnya bagi para pengamat yang tidak kenal dengan pola pikiran Islam, maka perubahan-perubahan tersebut tidak akan bisa terlihat, walaupun sebenarnya terjadi di depan matanya sendiri, kecuali bagi mereka yang mengamatinya secara seksama."

Tanpa disadari dan dipahami banyak orang, NU dan pesantren telah memberikan sumbangan yang sangat vital dalam membangun dan meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat bangsa yang kokoh. Sumbangan besar NU, pesantren dan para kiai terhadap bangsa ini setidaknya meliputi beberapa aspek kehidupan masyarakat bangsa yang mendasar.

A. Pribumisasi Islam: Penyebaran Islam secara Damai dan Menguatkan Budaya Masyarakat.

Pribumiasi atau upaya rekonsiliasi antara Islam dan budaya setempat adalah meminta agar wahyu dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, dengan memperhatikan nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat. Dalam proses ini, pembauran Islam dan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Al-Quran harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam salat.

Pribumisasi Islam bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, tetapi justeru agar budaya itu tidak hilang. Inti pribumisasi adalah

kebutuhan, bukan untuk menghindarkan polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan (Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam", 1989).

Pribumisasi adalah upaya membumikan Islam dengan menampilkan wajah Islam yang menguatkan budaya masyarakat setempat, bukan memposisikannya dalam kerangka yang kontradiktif. Pribumisasi adalah menghindarkan Islam tampil dalam manifestasi kegamaan yang asing dan ekstrem dalam kerangka Arabisasi, di mana Islam diposisikan di atas, dan budaya diposisikan di bawah atau di pinggiran.

Arabisasi dengan sendirinya menyebabkan umat Islam terasing dari masyarakat dan budaya lokal di mana mereka hidup. Bahkan ada kecenderungan permusuhan budaya, di mana Islam yang dimenifestasikan dalam keberagamaan cara lokal dianggap sebagai Islam yang menyimpang.

Pada dasarnya, agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya mempunyai wilayah tumpang tindih. Manusia tidak bisa beragama tanpa budaya, karena kebudayaan merupakan kreativitas manusia yang bisa menjadi salah satu

bentuk ekspresi keberagamaan. Tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa agama adalah kebudayaan. Di antara keduanya terjadi tumpang tindih dan saling mengisi namun tetap memiliki beberapa perbedaan.

Agama bersumber pada wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Norma-norma agama bersifat normatif, karenanya ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah kreativitas manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Dengan kata lain, perspektif demikian menempatkan agama dalam fungsinya sebagai wahana pengayoman tradisi bangsa dan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya (Abdurrahman Wahid, 1986).

Dengan kerangka pemikiran seperti itu, para ulama dan aulia zaman dulu berhasil menyebarkan Islam ke wilayah nusantara secara damai, dan dalam waktu bersamaan berhasil membuat proses pribumisasi Islam menjadi bagian dari proses penguatan budaya masyarakat. Dengan

demikian, masyarakat bisa dibimbing menjadi pribadi yang religius, dan pada saat yang sama budaya masyarakat semakin kokoh dan berdimensi spiritual.

Paradigma dakwah seperti ini tentu berbeda dengan cara-cara dakwah beberapa aliran Islam ekstrem akhir-akhir ini, di mana mereka menampilkan wajah Islam yang kaku, Arab-isasi, dan menganggap sesat budaya masyarakat. Akibatnya Islam menjadi kaku dan radikal. Bahkan cara dakwah demikian bukan hanya merusak budaya masyarakat, tetapi juga memecah belah masyarakat dan umat Islam karena umat Islam yang tetap mempertahankan budayanya dianggap sesat, bahkan kafir.

Akibatnya, cara dakwah kelompok keras itu pada akhirnya cenderung mengkafirkan umat Islam. Jangankan membuat Islam menyebar lebih baik ke pelosok Nusantara, yang terjadi justeru membuat masyarakat menjadi terpecah belah, membahayakan NKRI dan memecah-belah umat Islam sendiri. Ini tentu berbeda dengan cara dakwah para wali dan ulama terdahulu yang membawa Islam dalam manifestasi yang santun, beradab, dan akhirnya mampu mengislamkan orang-orang dari agama dan

kepercayaan berbeda. Atas jasa para wali dan ulama terdahulu itulah, Islam bisa menyebar ke seluruh Nusantara, dan pada saat yang sama Islam menjadi sumber nilai yang menguatkan proses kebudayaan masyarakat.

Hari ini budaya masyarakat Nusantara menjadi kokoh berdampingan secara dinamis dengan nilai-nilai Islam adalah berkat perjuangan para wali, kiai dan Nahdlatul Ulama. Bangsa ini, dengan demikian, berhutang jasa yang teramat besar kepada ulama dan NU.

B. Kiai: Sumber Kultur Toleransi dan Dinamisasi Masyarakat

Sejarah membuktikan bahwa Islam yang toleran dan dinamis di Indonesia bersumber dari kehidupan kiai dan pesantren. NU dan pesantren, berbeda dengan kelompok modernis seperti Masyumi, tidak pernah melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. NU dan pesantren juga tidak pernah melahirkan kader-kader teroris. NU dan pesantren justeru menyumbangkan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang toleran dan dinamis. Dan itu artinya, bangsa ini sangat berhutang budi kepada NU dan pesantren.

Kiai dan pesantren dengan tradisinya yang kokoh dan panjang memiliki sikap lentur untuk menerima modernisasi dari luar sebagai kenyataan, dan pada saat yang sama mencoba menyelamatkan inti ajaran Islam (dalam bentuk tauhid, syariah dan akhlak) dari kemerosotan lebih jauh dan kalau mungkin, mengembalikan alur kehidupan kepada tingkat ideal kehidupan masyarakat Islam. Spirit dasar keberagamaan kiai dan pesantren adalah gradualisme yang menolak konfrontasi dengan proses modernisasi, selain mencoba menjinakkan dan kemudian menggunakannya bagi kepentingan hakiki Islam. Prinsip yang digunakan di sini adalah sikap "memelihara apa yang minimal dapat dicapai" (Abdurrahman Wahid, 1978).

Nilai-nilai pesantren seperti keikhlasan, ketundukan pada guru, kesabaran meniti proses belajar dan kesediaan untuk hidup sederhana yang ditopang oleh olah batin yang memadai, memungkinkan pesantren menjadi sumber nilai kemandirian dan harmoni di tengah masyarakat. Tradisi pesantren menyediakan proses belajar secara total, sehingga nilai-nilai tersebut justeru menjadi jaminan bahwa selalu akan ada dinamisasi dan inovasi dalam kehidupan

pesantren dalam rangka menyerap dan menyeleksi perubahan yang datang dari luar. Namun karena tradisinya yang sudah sangat panjang, proses dinamisasi tersebut tentu saja akan berjalan secara gradual, sebuah proses yang justeru akan menghasilkan perubahan yang sangat mendalam di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Proses penerimaan dan penjinakkan itu bisa dicapai karena pesantren memiliki khazanah pemikiran klasik (*the legacy of the past*) yang sangat kokoh. Khazanah tersebut tidak hanya memberikan spirit pada pola hidup egalitarian dan pembangunan masyarakat yang toleran dan berkeadilan, tetapi juga bisa digunakan untuk menemukan kembali esensi pengalaman keberagamaan secara total yang melintasi batas kerangka legal-formalistik dan pendekatan monokultural terhadap realitas.

Dengan khazanah itu juga, meminjam istilah Abdurrahman Wahid, pesantren bisa menjadi pelopor pengembangan pandangan dunia yang lebih kosmopolit yang toleran terhadap pengalaman keberagamaan lain dan selalu siap membuka wawasan baru dalam rangka pengembangan diri secara terus-menerus.

Kultur toleransi dan Islam sebagai fundamental perubahan masyarakat merupakan produk dari khazanah pemikiran kiai dan pesantren. Jika tidak ada kiai dan pesantren, tidak menutup kemungkinan, Islam di Indonesia akan menjadi sumber kultur intoleran dan kemunduran, seperti ditunjukkan oleh kelompok-kelompok di luar NU.

C. Hutang Budi Politik: NU sebagai Pilar dan Penjaga Utama NKRI

Peran dan kontribusi kiai-kiai leluhur NU dalam proses pembentukan NKRI diakui secara luas. Suatu kontribusi yang sangat menentukan berdiri dan tegaknya NKRI sejak zaman perjuangan kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan sampai hari ini. Peran dan kontribusi itu meliputi empat dimensi waktu historis-politis.

Pertama, pada perjuangan kemerdekaan, para kiai dan santri merupakan kekuatan utama perjuangan melawan kaum penjajah. Sartono Kartodirdjo misalnya menyatakan peran kiai yang sangat besar dalam menanamkan sikap bermusuhan dan agresif terhadap orang asing dan juga pribumi yang menjadi aristokrat kolonial atau golongan penjajah.

Sementara Martin van Bruinessen juga membuktikan peran kiai yang sangat sentral dalam gerakan melawan penjajah, seperti ditunjukkan oleh Syaikh Abdussamad dan Syaikh Yusuf Makassar. Syaikh Abdussamad selalu mendorong Sultan Mataram (Hamengku Buwono I) dan Susuhunan Prabu Jaka (putra Amangkurat IV) untuk terus berjihad melawan orang kafir, sebagaimana dilakukan sultan Mataram sebelumnya. Sementara Syaikh Yusuf Makassar menjadi penasihat Sultan Agung Tirtayasa dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Sedangkan Anthony Reid menyampaikan catatan bahwa dalam setiap pergolakan atau krisis sosial-politik di Indonesia, para kiai selalu menunjukkan kemampuannya untuk memberikan dukungan dan inspirasi bagi perlawanan masyarakat dan heroisme. Kiai adalah peletak dasar nasionalisme dan patriotisme.

Kedua, satu dekade sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin, 8-12 Juni 1935, para ulama NU memutuskan bahwa wilayah Hindia Belanda (Nusantara) adalah "wilayah Islam" atau "negeri Islam" (*dar Islam*), tetapi bukan negara

Islam. Disebut wilayah Islam karena di wilayah Nusantara umat Islam bebas untuk menjalankan ajaran agamanya, dan Nusantara merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada.

Keputusan NU tersebut memberi legitimasi teologis terhadap wilayah Nusantara sebagai wilayah yang sah menurut Islam. Dengan demikian, karena merupakan wilayah yang sah, para pejuang yang membela kedaulatan Nusantara adalah pejuang kemerdekaan dan pejuang agama yang masuk kategori *syuhada*'.

Ketiga, pada tanggal 21-22 Oktober 1945, kiai-kiai NU yang dipimpin langsung oleh KH Hasyim Asy'ari berkumpul di Surabaya memutuskan status hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang telah diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Pertemuan tersebut memutuskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sah secara fiqih. Karena itu umat Islam wajib mengangkat senjata untuk mengusir penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Republik. Keputusan itu kemudian dikuatkan oleh Keputusan Muktamar ke-16 NU di

Purwokerto Jawa Tengah yang berlangsung pada 26-29 Maret 1946.

Dengan keputusan tersebut, NU telah memberi **status hukum** terhadap NKRI sebagai negeri Islam dan ideologi nasional Pancasila merupakan pengikat dan sekaligus penggerak seluruh kekuatan dan aspirasi masyarakat bangsa, dan ideologi itu keberadaannya tidak bertentangan dengan fiqih (hukum agama).

Karena NKRI adalah sah dari sudut pandang teologi dan fiqih, maka semua kelompok yang melawan terhadap NKRI bisa dihukumi sebagai pemberontak dan harus ditumpas. Karena itu tidak heran, jika pada akhir tahun 1940-an dan 1950-an ada sekelompok umat Islam yang memberontak terhadap pemerintahan Sukarno, NU memberikan dukungan penuh kepada Presiden Sukarno untuk menumpas semua bentuk pemberontakan tersebut.

Keempat, pada Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur tahun 1984, NU memutuskan menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Nahdlatul Ulama yang berhaluan akidah dan syariah Islam menurut faham *Ahlus Sunnah wal Jamaah* sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam

pembukaan UUD 1945 (*bilafdzi wa ma'na al-murad*), dengan rasa tanggung-jawab dan tawakkal kepada Allah serta mengharap ridha-Nya, NU berketetapan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Demikian keputusan resmi NU dalam muktamar tersebut (PBNU, *Keputusan Muktamar Ke-27 Nahdaltul Ulama*, 1985, hlm. 57-58).

Ulama NU sendiri sebenarnya pernah memperjuangkan berlakunya syariat Islam secara formal dalam kehidupan negara. KH A Wahid Hasyim dalam sidang-sidang BPUPKI misalnya memperjuangkan agar Islam ditetapkan sebagai agama negara dan syarat seorang presiden adalah beragama Islam. Demikian juga dalam sidang-sidang Konstituante tahun 1958-1959, Partai NU memperjuangkan berlakunya syariah dalam undang-undang negara. Namun KH A Wahid Hasyim kemudian menerima Pancasila dan UUD 1945 yang membuang tujuh kata dan Partai NU menerima pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD 1945 berlaku kembali.

Sikap mencoba untuk memperjuangkan berlakunya syariah pernah dilakukan, karena memang demikianlah perintah keagamaan

yang harus diikuti. Namun, begitu upaya itu menemui jalan buntu, kenyataan adanya negara nasional sebagai negara damai (*dar as-sulh*) harus diterima dengan penuh kesungguhan. Atas dasar cara berpikir beginilah diikuti kaidah fiqih yang berbunyi "*ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*", yang berarti "apa yang tidak mungkin terwujud seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan bagian terpenting di dalamnya". Secara keseluruhan, tentu wujud formal negara Islam yang semula diharapkan, tetapi dengan lahirnya Republik Indonesia, harus diterima yang terpenting di dalamnya, yaitu adanya negara yang memungkinkan kaum muslimin menjalankan ajaran agama mereka secara nyata (Abdurrahman Wahid, Pengantar dalam *NU dan Pancasila*, 1989, hlm. 10-11).

Para kiai, pesantren dan NU telah terbukti menjadi pilar nasionalisme dan patriotisme di Indonesia. NU menerima dan memperjuangkan NKRI secara lahir batin tanpa cacat. NU menjadi kekuatan inti yang mempertahankan NKRI dari berbagai serangan ideologi asing (baik Barat maupun Timur Tengah) sampai saat ini. Dan itulah hutang budi Indonesia kepada NU. Suatu hutang budi yang tidak akan pernah

bisa dibalas oleh bangsa ini, meski seluruh sumber daya, komponen dan struktur negara diserahkan kepada NU.

- 2 -

MENGENAL NU: LAHIR BATIN INDONESIA

A. Asal-usul/Genealogi Nahdlatul Ulama

Seperti ditegaskan Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama (NU) adalah gerakan keagamaan yang didesain untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran dan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ada di Indonesia sejak Islam pertama kali masuk ke Nusantara. Tradisi atau ajaran itu dicirikan dengan pemikiran keagamaan (fiqih) yang mengikuti garis mazhab (terutama mazhab Syafi'i), pemikiran teologis yang mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan pemikiran tasawuf yang mengikuti Imam Abdul Qadir al-Jailani dan Imam Abu Hasan as-Syadzili.

Trilogi pemikiran keagamaan itu melahirkan suatu pola keislaman yang kemudian ditandai dengan tradisi ziarah kubur, *tawassul* dengan orang-orang salih (baik masih hidup atau sudah mati), mendoakan mayit (*slametan*), mencintai *ahlul bait*, *salawatan*, dan sebagainya. Itulah tradisi khas warga NU.

Sebelum NU berdiri secara formal untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi-tradisi tersebut, para kiai sudah mengawalinya dengan mendirikan tiga organisasi, yaitu:

1. *Nahdlatul Wathan* (1914), gerakan pendidikan dan pembentukan jiwa nasionalisme.
2. *Nahdlatut Tujjar* (1918), gerakan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.
3. *Tashwirul Afkar* (1918), gerakan pemikiran berbasis mazhab.

Pada tahun 1926, ketiga organisasi itu dilebur menjadi organisasi baru yang diberi nama Nahdlatul Ulama.

B. Tujuan Didirikannya NU

Sebagaimana dirumuskan dalam *Statuten Perkoempoelan Nahdlatul Ulama Tahun 1926*, NU didirikan dengan tujuan:

a) Mengadakan hubungan dan membangun jaringan di antara ulama-ulama mazhab.
b) Memverifikasi kitab-kitab yang dipakai untuk materi pendidikan di pesantren supaya diketahui apakah kitab-kitab itu merupakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah.
c) Menyiarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam berdasarkan mazhab empat.
d) Memajukan pendidikan madrasah yang berdasar agama Islam.
e) Memakmurkan masjid, langgar dan pesantren.
f) Memperhatikan nasib anak-anak yatim dan fakir miskin, dan
g) Mendirikan badan-badan usaha untuk memajukan sektor pertanian dan perdagangan

C. Kekuatan NU sebagai Gerakan Sosial

NU memiliki karakteristik sebagai organisasi keagamaan yang mandiri dengan ditopang oleh beberapa kekuatan dasar:

1. Kemandirian pesantren: mandiri dari negara (termasuk dalam hal anggaran), tapi terintegrasi dengan masyarakat dan menyatu dengan gerakan NU.

2. Tradisi pesantren yang membentuk jaringan antar-pesantren secara genealogis dan keilmuan: misalnya tradisi kawin-mawin antar keluarga kiai besar dan tradisi pendirian pesantren dengan menginduk kepada pesantren gurunya.
3. Kharisma ulama: ulama sebagai tokoh spiritual, sumber pengetahuan agama dan pemimpin masyarakat.

Ketiga sumber kemandirian itu masih berdiri kokoh sampai saat ini, suatu kondisi dasar yang tidak dimiliki oleh organisasi Islam yang lain.

D. NU dan Nasionalisme

NU adalah organisasi keagamaan yang sejak awal membela pandangan negara nasional (*national state*), daripada "negara agama". Hal ini dibuktikan misalnya:

1. Pada Muktamar tahun 1936 di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa negara Hindia-Belanda – yang diperintah oleh non-Muslim (Belanda) – dapat diterima. Konsekuensinya, negara wajib dibela jika ada serangan dari luar. Alasannya, umat Islam dapat melaksanakan syariat dengan bebas.
2. Dalam perdebatan soal dasar negara pada tahun 1945, NU – melalui KH

Wahid Hasyim dan KH Masykur – mendukung dasar negara Pancasila untuk mempersatukan seluruh bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan suku.

3. Ketika beberapa kekuatan besar Islam memberontak terhadap negara, seperti yang dilakukan Masyumi dan PRRI, NU menghukumi mereka sebagai pemberontak (*bughat*) dan memberi gelar kepada Sukarno sebagai *waliy al-amr ad-dlarury bis-syaukah* (pemegang kekuasaan sementara dengan otoritas penuh), sebagai dukungan untuk menumpas separatisme yang melibatkan tokoh-tokoh Islam modernis.
4. NU menjadi ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas pada tahun 1984
5. NU (melalui PKB) menolak dimasukannya Piagam Jakarta dalam UUD 1945 seperti diusulkan partai-partai Islam pada Sidang Umum MPR 1999-2002. Pada Rapat Paripurna ke-6 Sidang Tahunan MPR 2002, Sabtu 10 Agustus 2002, MPR akhirnya memutuskan untuk tidak mengubah pasal 29 UUD 1945, ayat 1 dan 2.

E. NU dan Modernisasi Bangsa

Karakteristik NU sebagai organisasi Islam tradisional adalah kemampuannya untuk menyerap dan berhubungan dengan perubahan masyarakat, tanpa meninggalkan tradisinya yang khas. Berbeda 180 derajat dengan Islam modernis yang menunjukkan kekakuan pemikiran, NU justeru sangat fleksibel dan moderat. Tidak berlebihan kiranya jika Allan A Samson mengungkapkan keheranannya terhadap sikap NU yang lebih fleksibel, adaptif dan akomodatif terhadap otoritas sekular daripada kelompok Islam modernis seperti Masyumi (Allan A Samson dalam Karl D Jackson & Lucian W Pye (eds.), *Political Power and Coummunications in Indonesia*, 1978: 212).

Modernisasi yang tercerabut dari tradisi tidak pernah menghasilkan modernitas. Demokratisasi yang dijalankan secara ekstrem meninggalkan tradisi juga tidak pernah melahirkan kultur dan nilai-nilai demokrasi. Modernisasi dan demokratisasi di lingkungan NU benar-benar mengakar kuat pada tradisi sehingga perubahan yang dihasilkan juga sangat fundamental, mempengaruhi kehidupan bangsa secara nyata, karena yang diubah bukan permukaannya semata,

tetapi struktur dalam kehidupan masyarakat bangsanya.

F. Mengapa NU bisa Menjadi Kekuatan Nasionalisme, Pembuka Jalan bagi Modernisasi dan Penopang Demokratisasi?

NU secara nyata telah menjadi kekuatan nasionalisme, menerima modernitas dan menopang demokratisasi secara menyeluruh karena bangunan tradisinya sangat kokoh dan mengakar kuat pada sejarah panjang pemikiran Islam dan budaya masyarakat. Pesantren NU selalu disebut sebagai pesantren *salaf* dan pemikiran NU juga mengikuti tradisi *salafiyah*, karena pemikiran NU selalu mengacu kepada pemikiran atau pendapat ulama-ulama terdahulu (*salaf*), yaitu ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

Dengan bersandar kepada ulama dan tradisi pemikiran mazhab terdahulu, pemikiran NU bisa sangat fleksibel, tidak kaku. Dalam banyak hal, ulama mazhab dan ulama klasik seringkali mempunyai cara dan pandangan berbeda dalam memahami dan memutuskan status hukum suatu realitas persoalan hidup masyarakat.

Kesadaran untuk mengikuti ulama klasik merupakan suatu bentuk realisme yang menghasilkan sikap tulus untuk menjauhkan diri dari watak kaku dalam memandang realitas. Berbeda dengan Islam modernis, NU justeru bisa terbebas dari pandangan serba tunggal dan monolitik terhadap realitas.

Dalam konteks ini, khazanah pemikiran ulama klasik tidak hanya memberikan spirit pada pola hidup egalitarian dan pembangunan masyarakat yang toleran, tetapi juga bisa digunakan untuk menemukan kembali esensi pengalaman keberagamaan secara total yang melintasi batas kerangka legal-formalistik dan pendekatan monokultural terhadap realitas (Abdurrahman Wahid dalam Godfrey Guna-tilleke dkk. (eds.), *Ethical Dillemas of Develop-ment in Asia*, 1983: 44-45).

Dengan tidak mendasarkan pemikirannya kepada al-Quran dan Hadis secara langsung, NU bisa terhindar dari pemikiran yang tekstual dan interpretasi tunggal terhadap teks dan realitas. Pemikiran NU lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan, karena tafsir yang dibangun merupakan rekonstruksi pesan sosioetik Islam melalui reinterpretasi al-Quran dan Hadis

dalam perspektif pemikiran mazhab dan sejarah itu sendiri.

Potensi munculnya pemikiran dan sikap yang kaku dan keras juga dicegah. Dalam tradisi pendidikan pesantren selalu diciptakan keseimbangan antara pelajaran *fiqh* (hukum Islam) dan tasawuf. Terlalu banyak mempelajari fiqh akan membuat seseorang kaku, keras dan formalistik. Khusus bulan Ramadhan, pesantren NU biasanya hanya mengajarkan kitab-kitab tasawuf atau Hadis tentang keutamaan berbuat kebajikan, tidak mengajarkan fiqih.

Karena itu dalam hal strategi kebudayaan, berbeda dengan gerakan modernisme Islam yang puritan, bagi NU, percampuran Islam dengan budaya lokal dianggap sebagai bagian dari kearifan tradisional yang justeru akan membuat agama mempunyai akar yang kuat dalam kebudayaan masyarakat setempat.

Dengan konstruk pemikiran, tradisi dan pandangan dunia seperti itu, maka ada tiga identitas penting yang dimiliki NU dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pertama, dalam tataran politik negara, NU akan selalu mendukung bentuk negara nasional dan NKRI. NU menolak separatism. Bagi NU menjaga

NKRI sama dengan menjamin lestarinya ajaran Islam, khususnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Kedua, dalam tataran pemikiran keagamaan, NU selalu mencari keseimbangan dengan mengambil hal-hal penting dari berbagai pemikiran dan ideologi, dengan selalu mencari jalan tengah di antara dua pemikiran ekstrem (*at-tawasuth bainal ara'*). Karena itu NU tidak mungkin melahirkan fundamentalisme, radikalisme dan terorisme.

Ketiga, karena landasan dan tujuan politik NU adalah kemaslahatan umum (*al-maslahah al'ammah*), maka NU akan selalu memperjuangkan pemikiran dan sistem yang bisa menjamin kemaslahatan itu (melindungi hak-hak dasar dan meningkatkan kesejahteraan rakyat). Dengan pertimbangan kegamaan seperti itulah, NU bisa menerima demokrasi sebagai sistem yang paling rasional dan realistik untuk mewujudkan kemaslahatan.

- 3 -

GERAKAN SISTEMIK MENYINGKIRKAN NU

A. Karena NU adalah Sumber dan Pilar Kemandirian Bangsa

Cita-cita agung para pendiri Republik ini (*the founding fathers*) – seperti KH Hasyim Asy'ari dan KH A Wahid Hasyim – adalah menjadikan Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat dalam makna dan wujud yang sesungguhnya. Cita-cita ini mengandung pesan dan pengertian bahwa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini tidak akan secara otomatis terwujud dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sejati adalah bebas dari – pengaruh, pendiktean dan hegemoni – imperialisme (kapitalisme global) - yang sesungguhnya

sudah menguasai Dunia Ketiga jauh sebelum Indonesia merdeka.

Di satu sisi, imperialisme – yang membon-ceng pada proyek kapitalisme internasional (melalui agenda globalisasi dan demokratisasi) – terus-menerus berusaha mengukuhkan dominasi dan hegemoninya di negara-negara miskin dan berkembang. Di sisi lain, mereka juga mempunyai kaki dan pengikut di negara-negara Dunia Ketiga, yaitu elit politik dan kelas terdidik, yang secara sukarela membantu dan mendukung agenda imperialisme. Pengabdian pada patron, yaitu bangsa asing, menjadi bagian dari cara mereka untuk bisa tetap *survive*, terhormat dan cukup secara materi. Itulah elit yang bisa disebut sebagai "marsose Kompeni".

Secara kultural, neo-imperialisme juga berakibat pada hancurnya kebudayaan lokal karena dianggap tidak sesuai dengan semangat globalisasi dan demokratisasi, yang sesungguh-nya lebih merupakan ancaman terhadap hegemoni negara pusat. Karena budaya lokal cendeurng mempunyai daya dan potensi resisten terhadap semua yang datang dari luar.

Dalam hal membangun daya tahan bangsa (secara ideologi, politik dan kultural), NU adalah

sumber dan pilar yang paling efektif dan nyata selama ini. Karena itu, dalam perspektif para hegemon, NU adalah "musuh utama" bagi proyek mereka untuk menaklukkan dan menjinakkan Indonesia. Karena itu tidak heran jika segala upaya dilakukan untuk menghancurkan, memecah-belah dan menyingkirkan NU dari arus utama kehidupan bangsa.

Mengapa penjajahan dan mental terjajah tetap bertahan sampai sekarang di Indonesia? Mengapa ada struktur hegemonik dan dominatif dalam sistem dunia yang menjadikan kita tidak bisa mandiri dan berdaulat? Pertanyaan-pertanyaan itu akan dirunut jawabannya dengan menggunakan analisis teori sistem dunia. Dengan teori ini akan dianalisis asal-asul hegemoni dan hierarki pusat/pinggiran (*core/ pariphery hierarchy*).

B. Teori Sistem Dunia

Immanuel Wallerstein mengembangkan teori sistem dunia pada awal 1970-an. Teori yang dibangun atas inspirasi Mazhab *Annales*-nya historiografi Prancis dan teori dependensia ini, berusaha menjelaskan asal-usul dan proses kapitalisme, revolusi industri, dan hubungan

yang rumit antara negara-negara Dunia Pertama, Kedua dan Ketiga (Thomas D Hull, "World-Systems Analysis: A Small Sample from a Large Universe" dalam Thomas D Hull (ed.), *A World Systems Reader: New Perspective on Gender, Urbanism, Cultures, Indigenous Peoples, and Ecology*, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2000, hlm. 4-5).

Sistem modern dunia muncul di Eropa Barat sekitar 500 tahun yang lalu, atau antara 1450 dan 1640. Sistem ini didasarkan atas jaringan-jaringan perdagangan kapitalisme yang mentransendensikan batas-batas negara. Dorongan untuk mengakumulasi modal melalui produksi menyebabkan persaingan yang semakin meningkat di antara para produsen kapitalis dalam memperebutkan tenaga kerja, bahan-bahan mentah untuk produksi dan pasar.

Jelasnya, teori sistem dunia bermaksud menjelaskan hubungan antara dunai Pertama, Kedua dan Ketiga dan peranan masing-masing dalam pertumbuhan kapitalisme dan industrial-isasi, sampai pada dominasi dan hegemoni dunia Pertama atas dunia Kedua dan Ketiga. Karena itu teori sistem dunia, pada akhirnya akan menjelaskan hubungan yang eksploitatif dan

dominatif antara negara-negara pusat/hegemon/kapitalis/imperialis (*core/center*) dan negara pinggiran yang dieksploitasi (*pariphery*).

Sistem dunia sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Karena itu juga, dalam kurun waktu tertentu hegemoni dunia selalu dipegang oleh negara yang berbeda. Pada masa awal kapitalisme misalnya, hegemoni dipegang oleh Belanda. Namun pada abad ke-18, terjadi transisi hegemoni dari Belanda ke Inggris, dan pada abad ke-19 dan ke-20 terjadi lagi transisi dari Inggris ke Amerika Serikat (Giovanni Arrighi & Beverly J Silver, *Chaos and Governance in the Modern World System*, London: University of Minnesota Press, 1999).

C. Hierarki Pusat-Pinggiran

Logika hubungan negara pusat-pinggiran secara sederhana dirumuskan oleh Andre Gunder Frank sebagai berikut: negara-negara pusat secara konstan mengakumulasi modal, sedang negara pinggiran secara konstan menjadi pemasoknya (*supplier*).

Negara pusat adalah negara yang mempu-nyai tingkat distribusi dan produksi industri yang

sangat tinggi, merupakan negara kuat, memiliki kelas borjuis yang kuat dan kelas pekerja yang besar. Sebaliknya, negara pinggiran memiliki tingkat produksi yang rendah (meski memiliki bahan mentah yang cukup), merupakan negara lemah, kelas borjuisnya kecil dan memiliki banyak petani.

Hubungan antara negara pusat dan pinggiran bersifat hierarkis. Dan hierarki itu merupakan struktur dominasi dan eksploitasi (Christopher Chase-Dunn, *Global Formation: Structures of the World-Economy*, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 1998, hlm. 203). Dan struktur hierarkis, dominatif dan eksploitatif itu merupakan komponen utama dari sistem dunia kapitalis saat ini.

D. Imperialisme Pascakolonial di Indonesia: Operasionalisasi dan Aktornya

Meski penjelajahan Eropa ke Asia sudah mulai pada abad ke-1 M, namun kontak signifikan Eropa dan Asia baru dimulai pada 27 Mei 1498 ketiga Vasco da Gama (Portugis) mendarat di Calcuta, India. Penemuan India itu membuka jalur perdagangan Eropa (Portugis) di Asia, meski pada

awalnya motif Portugis tidak semata-mata ekonomi, tapi juga agama.

Serangan Portugis ke Malaka pada 1511 sangat dignifikan sebagai serangan pertama terhadap kepulauan Nusantara. Dari Malaka, Portugis kemudian menguasai Maluku dan Papua Nugini. Setelah Portugis, Belanda dan Inggris juga masuk ke Nusantara. Pada 1601, Belanda mengusir Portugis dari Banten dan pada 1605 merebut Maluku dari Portugis. Inilah awal imperialisme Barat di Indonesia, dan sekaligus awal dibangunnya hubungan hierarkis-eksploitatif-dominatif antara negara pusat (Belanda) dan pinggiran (Indonesia).

Imperialisme kolonial Barat di Indonesia ditandai dengan penguasaan secara total wilayah dan struktur masyarakat, baik struktur ekonomi maupun politik. Indonesia dieksploitasi besar-besaran untuk kepentingan ekonomi Belanda. Imperialisme kolonial bisa bertahan lama (meski jumlah tentara Belanda tidak ada 1% dari total penduduk Indonesia), karena ideologi ini ditopang oleh struktur dan aktor lokal. Imperialisme ditopang oleh tiga kekuatan penting, yaitu orang-orang Belanda sendiri, orang Cina dan Bumiputera.

Orang Belanda menguasai masalah politik dan keamanan secara umum untuk kepen-tingan eksploitasi sumber-sumber ekonomi atau bahan-bahan mentah produksi. Orang Cina menguasi distribusi ekonomi. Sedang orang pribumi sendiri menjadi pekerja dan suplier untuk kepentingan akumulasi modal Belanda.

Sementara imperialisme modern ditandai oleh dua hal berikut. Pertama, imperialisme ini menuntur partisipasi aktif negara dalam hubungan ekonomi internasional. Negara imperialis tidak bisa secara mandiri atau bersama-sama mengimplementasikan kebijak-an-kebijakan neo-kolonial tanpa ada dukungan kapitalisme negara (*state capitalism*) di pinggir-an. Kedua, yang pertama dan utama, kebijakan neo-kolonial didesain untuk mencegah potensi independen negara pinggiran dalam melakukan konsolidasi politik dan sekaligus untuk mempertahankan ketergantungan negara pinggiran secara penuh dalam sistem kapital-isme dunia (James O'Connor, 'The Meaning of Economic Imperialism', dalam Michael Smith dkk (eds.), *Perspective on World Politics,* London: Chatham House Publishers, 1981: 283).

Pada masa kolonial, imperialisme diwujud-kan dalam rekayasa dan skenario geopolitik, di mana negara imperialis menguasi struktur geo-politik suatu negara secara langsung. Di negara yang dikuasasi itu dia menciptakan kelas elit pribumi yang secara sadar mengabdi kepada kepentingan mereka, dan itulah kaum Marsose.

Pada masa pasca-kolonial, imperialisme diwujudkan dalam rekayasa dan skenario penguaasaan secara tidak langsung wilayah suatu negara, karena dalam bahasa Tuathail & Dalby, imperialisme modern itu dioperasional-isasikan; *pertama*, secara formal (*formal geopolitics*) melalui lembaga-lembaga strategis, kelompok pemikir dan para akademisi; *kedua*, secara praktis (*practical geopolitics*) misalnya melalui kebijakan luar negeri, birokrasi dan lembaga-lembaga politik; dan *ketiga*, secara umum (*popular geopolitics*) melalui media massa, film, novel, kartun, dsb.

Imperialisme dalam struktur politik dimani-festasikan dalam isu "demokratisasi". Sedang dalam struktur ekonomi diwujudkan dalam isu "globalisasi". Semua negara, dipaksa dan didikte untuk menjadi demokratis – sekurang-kurangnya secara formal-prosedural – dan

membuka diri dalam sektor ekonomi karena globalisasi diasumsikan tidak mungkin dilawan.

Untuk mensosialisasikan demokratisasi dan globalisasi menjadi kesadaran kolektif negara pinggiran, negara imperialis menggunakan kaum intelektual dan elit negara pinggiran sebagai aktornya, dengan menguasai cara berpikir mereka, misalnya dengan program beasiswa untuk belajar di negara Barat. Kaum elit terdidik itulah yang akan menjadi penopang imperialisme dengan "mengamankan" dan "mengawal" program-program imperialisme modern dalam perdebatan wacana di tanah air.

Sementara imperialisme dalam struktur ekonomi secara langsung diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau hutang (*aid as imperialism*). Hutang digunakan sebagai alat imperialisme dan politik. Tema tentang imperialisme tersebut diangkat dalam dua buah proposal dari AS dan Inggris pada *Konferensi Bretton Woods*. Penolakan pada proposal Keynes yang memperingatkan bahwa hutang bersifat endemik dan merupakan konsekuensi dari rencana-rencana AS yang dibuat untuk Bank Dunia dan IMF merupakan bukti yang bermanfaat bagi Dunia Ketiga. Hal tersebut

menunjukkan bahwa hutang Dunia Ketiga adalah produk langsung dari politik pasca perang AS dan aspirasi ekonomi AS (Michael Rowbotham, *Goodbye America: Globalisation, Debt and The Dollar Empire*, Charlbury: Jon Carpenter Publishing, 2000, hlm. 8).

Mengapa hutang (dan globalisasi) – yang merupakan konsep dasar dalam ekonomi neo-liberal – harus dianggap sebagai manifestasi dari imperialisme modern? Jawabannya adalah karena asumsi-asumsi dasar yang ada dalam konsep neo-liberal sepenuhnya untuk kepentingan akumulasi modal negara kapitalis dan penyedotan surplus pada negara pinggiran.

Misalnya konsep tentang hutang yang diberikan kepada negara debitur (pinggiran) untuk memacu meningkatkan ekspor dan pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi. Negara debitor melunasi hutangnya dengan jalan meningkatkan nilai ekspornya agar melebihi nilai impor, termasuk di dalamnya perebutan dalam kompetisi pasar global.

Menurut Rowbotham, keberatan-keberatan atas bentuk tersebut bermunculan, baik dipandang dari segi empiris maupun teoritis. Jika dilihat dari segi empiris, negara-negara

debitor telah gagal untuk mencapai tahap surplus dalam perdagangan sesuai dengan apa yang diinginkan agar mereka bisa melunasi hutang mereka. Secara teoritis, bentuk ini sebenarnya telah gagal dalam berbagai hal. Sebagaimana seperti yang ditetapkan, negara sedang berkembang harus bisa mencapai surplus dalam perdagangannya agar bisa melunasi hutangnya, tapi tidak hanya negara sedang berkembang saja yang mengejar target surplus tersebut, negara-negara yang makmur pun (negara pusat) berusaha untuk menjaga nilai surplus perdagangannya. Nilai perdagang-an mungkin meningkat, volume aliran barang mungkin meningkat, tapi surplus perdagangan satu negara merupakan defisit perdagangan bagi negara lain.

Kelemahan dari model perekonomian seperti ini adalah pada asumsi bahwa negara debitor dapat memperoleh surplus perdagangan dengan mengekspor barang ke negara kreditor, tapi dengan begitu negara debitor akan langsung berhadapan dengan negara kapitalis yang kuat yang sudah pasti melakukan hal yang sama.

Itulah lingkaran setan imperialisme modern yang dimunculkan dalam konsep ekonomi neo-liberal, globalisasi, pemberian pinjaman, dsb. Dan

bangsa ini sepenuhnya masih berada dalam kekuasaan imperialisme modern itu, dengan aktor-aktor lokal yang justeru bangga menjadi kelas komprador.

Untuk memuluskan proyek tersebut dan sekaligus mengikis habis potensi perlawanan dari kelompok nasionalis, proyek utama kapitalisme internasional adalah menyingkirkan NU dari panggung ekonomi-politik bangsa. Proyek ini ada yang langsung dikendalikan dari luar negeri, tetapi sebagian besar dijalankan oleh antek-antek asing di dalam negeri.

E. Lima Fase Penyingkiran NU

Di kalangan kaum elit Barat dan Indonesia sejak tahun 1940-an, kelompok tradisional seperti NU dianggap tidak kapabel untuk mengelola kekuasaan, memimpin negara dan birokrasi. Tidak mengherankan jika sejak Indonesia merdeka, sirkulasi elit selalu berjalan dalam mekanisme kanibalisme dan penyingkiran terhadap mereka yang dicap tidak kapabel menjadi elit, yaitu mereka yang dianggap merepresentasikan Islam tradisional.

Seperti dikatakan Harold Crouch, pemimpin pemerintahan yang terjun ke dalam pergerakan nasional sejak tahun 1920-an kebanyakan datang dari kalangan urban. Mereka adalah kelompok elit yang menyenyam pendidikan Belanda (Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1978, 26). Orang-orang pesantren yang berpendidikan agama, tidak cukup kuat untuk masuk dalam pergerakan, meski mereka babak-belur melawan tentara Belanda secara langsung.

Pada 22 Oktober 1945, para ulama NU berkumpul untuk membahas pendaratan pasukan Inggris di Jawa. Hasil pertemuan memutuskan perang jihad (*jihad fi sabilillah*) melawan sekutu Inggris-Belanda, demi tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam (Andree Feillard, *NU vis-avis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, alih bahasa Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 41-42). Keputusan ulama itu diselenggarakan ketika "tentara-tentara Republik" dan kaum terdidik justeru sedang bingung dan tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga banyak pihak menyatakan jika kiai NU tidak mengeluarkan resolusi jihad, besar kemungkinan

kemerdekaan yang baru diproklamasikan akan hilang bersama datangnya tentara Inggris.

Umaruddin Masdar dalam bukunya *Gus Dur Pecinta Ulama Sepanjang Zaman* (2006) mencatat tiga fase peyingkiran NU dalam sejarah Indonesia. Saya melengkapinya dengan tambahan dua fase.

1. Rasionalisasi Tentara

Rasionalisasi tentara dilakukan oleh Wakil Presiden Moh Hatta yang merangkap sebagai Perdana Menteri. Rasionalisasi tentara menjadi program kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948 (Djawatan Penerangan Daerah Intimewa Jogjakarta, *Mengenang 5 Tahun Merdeka*, Cet. II, 1950, hlm. 33-34). Program ini yang didukung oleh AH Nasution sebenarnya merupakan pembersihan dan penyingkiran secara sistematis laskar-laskar NU dari tubuh tentara, juga laskar lain yang dianggap liar.

Rasionalisasi adalah mengorganisasi tentara dengan mengurangi sekitar setengah juta laskar yang tidak disiplin menjadi pasukan teratur dan terlatih sejumlah sekitar 57.000 orang (Audrey Kahin & George McT Kahih, *Subversi sebagai*

Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia, alih bahasa RZ Leirissa, Jakarta: Grafiti, 1997, hlm. 57). Menurut C van Dijk dalam bukunya *Darul Islam*, syarat-syarat untuk masuk dan promosi dalam Tentara Republik dibuat demikian rupa sehingga para anggota laskar – yang tingkatan pendidikan militer dan pendidikan umumnya rendah – nyata-nyata dirugikan (C van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1995: xxii). Pengurangan jumlah tentara diperlukan – setidaknya menurut retorika politik – untuk membentuk kesatuan tentara yang terlatih, efisien dan difasilitasi dengan persenjataan yang lengkap.

Tindakan pertama yang dilakukan adalah melucuti senjata laskar-laskar. Laskar pertama yang dilucuti adalah kesatuan yang dipimpin Bung Tomo (George McT Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1970, Edisi II, hlm. 264-265), pejuang yang memimpin pengusiran tentara Inggris di Surabaya.

Akibat rasionalisasi ini, anggota laskar-laskar NU yang kebanyakan berpendidikan pesantren tanpa pernah mengenyam pendidikan umum

dan kemiliteran, tersingkir dari tentara. Tentara Indonesia pun menjadi sangat elitis. Orang yang tidak berpendidikan formal, apalagi yang buta huruf, tidak punya peluang untuk menjadi anggota korps perwira di mana keterpelajaran, dan lebih baik lagi suatu pendidikan menengah, dianggap sebagai prasyarat untuk menjadi perwira (Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, alih bahasa Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 30). Menurut C van Dijk, bagi Nasution, Simatupang dan Kawilarang, laskar yang mereka sebut sebagai prajurit-prajurit liar merupakan ancaman, yang standar kemiliteran dan kecerdasannya mereka cemoohkan.

Sikap anti-laskar memang tumbuh subur di kalangan elit tentara pasca kemerdekaan. Mayoritas perwira berasal dari kalangan elit atau pembesar, sehingga tidak begitu diterima, tidak dekat dengan rakyat. Sementara kebanyakan laskar berasal dan tumbuh mandiri bersama rakyat, sehingga mereka sangat dekat dengan rakyat tersebut. Kedekatan rakyat dengan laskar-laskar itu juga disebabkan oleh kenyataan bahwa para laskar selalu berada di

garis depan dalam melawan tentara penjajah, tanpa pamrih dalam perjuangan.

Dalam fakta politik, menurut Ulf Sundhaussen tentara di seluruh dunia selalu menganggap eksistensi laskar atau milisi yang kuat dan berdiri sendiri sebagai satu ancaman bagi salah satu di antara kepentingan mereka yang lebih penting sebagai golongan, yakni menyangkut monopoli atas penggunaan cara-cara kekerasan. Apabila tentara bertanggung-jawab atas pertahanan terhadap ancaman dari luar, maka segenap potensi pertahanan harus berada di bawah pimpinan Markas Besar Tentara, dan apabila tentara juga bertanggung-jawab atas keamanan dalam negeri, maka tidak boleh ada pasukan bersenjata lainnya, kecuali Angkatan Kepolisian.

Para gerilyawan, laskar-laskar, yang seharusnya diberi penghargaan karena usaha-usaha mereka dan diakui sebagai cabang pemerintah militer dan sipil yang sah dalam daerahnya masing-masing – yang mereka anggap sekadar sebagai hadiah – malahan jadi korban politik rasionalisasi. Mereka harus mundur dan melihat saja, sementara yang lain-lain memperoleh kekuasaan. Demobilisasi mereka sendiri secara besar-besaran dipersiap-

kan, sedangkan orang luar diangkat pada jabatan militer dan sipil yang penting, dan bekas musuh – serdadu KNIL dan pejabat negara-negara bagian RIS – diberi kedudukan menjadi pegawai negara yang baru itu (C van Dijk, *Darul Islam..,* hlm. 322-323).

Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia juga mengakui bahwa "rasionalisasi jang untuk menjehatkan negara, harus membuat korban-korban, di kalangan opsir-opsiran, lasjkar-eigenaars, politieke partij-officieren, dll. yang tidak reeel dan tidak langsung dibutuhkan oleh pertahanan negara" (Markas Besar Angkatan Perang, *Rasionalisasi dan Rekonstruksi Angkatan Perang Republik Indonesia*, Jogjakarta: Pertj. KR Jogjakarta, 1948, hlm. 11).

Upaya-upaya sistematis penyingkiran dan marginalisasi terhadap NU di lingkungan politik dan militer sudah terlihat jelas ketika pada 19 Oktober 1945 dibentuk Staf Pendidikan untuk meletakkan garis-garis pedoman bagi pendidikan politik tentara. Staf pendidikan ini dikepalai oleh Soekono Djojopratiknjo, seorang bekas pegawai kantor pos dan anggota partai sosialis, dan terdiri dari dua orang sosialis lainnya, tiga politisi Islam dari Masyumi, dan Dr Mustopo, orang yang agak

eksentrik dan bekas komandan BKR Surabaya. Dus, hanya golongan Sosialis dan Masyumi saja yang terwakili di dalam Staf Pendidikan itu.

Di kemudian hari sejarah mencatat, bahwa kaum Sosialis dan Masyumi yang pada masa pra-kemerdekaan bersikap anti-Barat, misalnya dalam bentuk penolakan terhadap bantuan asing, setelah kemerdekaan diraih justeru menjadi pembuka jalan bagi intervensi Barat di Republik. Tokoh seperti Hatta (Sosialis) dan Soekiman Wirjosandjojo (Masyumi) berbelok menjadi pendukung bantuan asing dalam pembangunan ekonomi (*economic minded* – dalam istilah Higgins), atau dari pendukung paham sosialis demokrat (sosdem) ke liberal. Tokoh yang sejalan secara metamorfosis politik dengan Hatta dan Soekiman adalah Syafruddin Prawiranegara (Masyumi), Natsir (Masyumi) dan Sumitro Djojohadikusumo dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Kebijakan untuk mengundang modal asing pertama kali diambil oleh Syafruddin Prawiranegara, ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Natsir. Kabinet Soekiman kemudian melanjutkan kebijakan pro-Barat, karena sikap dasarnya yang anti-komunis

(Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York: Cornell University Press, 1964: 182-207).

Implikasi dari rasionalisasi adalah minimnya anggota TNI yang berasal dari Nahdlatul Ulama dan berpihak terhadap NU, dan dalam berbagai kasus NU seringkali menjadi bemper politik elit Sosialis-Masyumi dan tentara (seperti pada kasus pemberantasan komunisme) dan menjadi tempat eksperimentasi kekerasan politik seperti kerusuhan di daerah basis-basis NU di akhir Orde Baru dan pembunuhan guru ngaji dengan dalih dukun santet beberapa tahun yang lalu.

2. Politik Developmentalisme

Marginalisasi dan penyingkiran NU secara struktural fase *kedua* adalah dikembangkan dan dijalankannya ideologi pembangunan atau developmentalisme oleh rezim Orde Baru. Pembangunan dilaksanakan karena setelah Orde Lama berakhir, Orde Baru mewarisi keadaan ekonomi yang sangat parah, dengan inflasi yang beratus-ratus persen setahun, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, bahkan sampai negatif pada akhir masa Orde Lama,

utang luar negeri yang menumpuk dan yang tidak terangsur dari hasil ekspor yang hanya beberapa ratus juta dollar saja setahun. Dengan fakta seperti itu, pembangunan atau modernisasi merupakan proses dan tantangan yang tidak dapat dielakkan oleh negara-negara sedang berkembang, apalagi negara miskin dan terbelakang seperti Indonesia.

Yang menarik, sejarah tentang utang luar negeri Indonesia tidak pernah disampaikan secara jujur dan transparan kepada masyarakat. Hal yang tidak pernah disampaikan kepada masyarakat – termasuk kepada siswa dan mahasiswa – adalah kisah tentang Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, November dan Desember 1949. Dalam KMB tersebut, saat mana Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik, wakil Amerika Serikat, Merle Cochran, yang bertindak sebagai moderator, memihak Belanda dengan menuntut dua hal dari Indonesia. Mengingat Amerika Serikat masih prihatin dengan keadaan perekonomian Belanda, Cochran memaksa agar Republik menanggung utang Hindia-Belanda sebesar 1,13 miliar dollar Amerika. Sekitar 70% dari jumlah itu adalah utang pemerintah kolonial, yang menurut pihak Indonesia 42 persen

merupakan biasa operasi militer dalam menghadapi Republik. Mengingat mereka telah setuju agar semua investasi Belanda (dan pihak asing lainnya) di Indonesia akan dilindungi, persyaratan tersebut dinilai pihak Indonesia sangat tidak adil. Jaminan pribadi yang diberikan Cochran kepada Indonesia bahwa mereka akan mendapat bantuan yang cukup besar dari pihak Amerika Serikat untuk melunasi beban utang tersebut terbukti kosong belaka ketika ternyata yang diberikan hanya 100 juta dollar Amerika, itupun dalam bentuk kredit ekspor-impor yang harus dibayarkan kembali (Audrey Kahin & George McT Kahih, *Subversi...,* hlm. 40).

Politik pembangunan dikatakan sebagai bagian sistemastis menyingkirkan NU karena seca faktual mayoritas warga NU berprofesi sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Sementara pembangunan Orde Baru berwatak industrialistik dan terkonsentrasi di kawasan perkotaan (*urban-centered development*).

Secara teoritis, pada awal Orde Baru pembangunan pertanian memang mendapat prioritas, terutama dalam program peningkatan produksi pangan untuk mencapai swasembada beras – yang baru dicapai 15 tahun kemudian, yaitu 1985.

Namun data empirik menunjukkan bahwa proyek industrialisasi lebih banyak pendukungnya di kalangan penentu kebijakan. Faktor ini saja sudah cukup menerangkan mengapa akhirnya industri (manufaktur) berkembang jauh lebih cepat daripada pertanian (Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 133).

Menurut Mubyarto, secara kuantitatif pembangunan ekonomi yang mendapat prioritas utama sejak pemerintahan Orba telah menyebabkan kenaikan laju pertumbuhan sektor pertanian dari 1,6% pertahun pada tahun 1960-1967, menjadi 4,1% pada awal Orde Baru (1967-1973), meskipun kemudian mengendur lagi pada tahun 1973-1981 (3,5 pertahun). Sebaliknya, sektor industri laju pertumbuhannya meningkat tajam, yaitu dari 1,0% menjadi 9,6% dan 14% untuk periode yang sama.

Hal demikian terjadi karena dana-dana pembangunan yang amat besar, baik yang berasal dari utang luar negeri maupun yang datang dari rezeki minyak, lebih banyak diinvestasikan ke sektor industri dan bangunan. Investasi sektor pertanian bahkan menurun dari 2,7% pada tahun 1971 menjadi hanya 2,2% pada 1980. Sementara

investasi sektor industri manufaktur dan bangunan luar biasa tingginya, yaitu 88,8% pada 1971 dan 85,2% pada 1980.

Secara halus, Rizal Ramli pernah menyata-kan bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai dalam peningkatan produksi barang-barang industri sejak pemerintahan Orde Baru. Namun jika dianalisis ciri-ciri industri Indonesia yang berkembang selama ini, terutama sektor manufaktur, kebanyakan tidak memenuhi tujuan-tujuan dan kriteria seperti yang digaris-kan dalam berbagai Repelita, yaitu dengan menggunakan banyak tenaga kerja, menghe-mat dan menghasilkan devisa, dan mengguna-kan bahan baku lokal (Rizal Ramli, "Industri Indonesia: Antara Tujuan dan Kenyataan", *Prisma*, No. 12, desember 1982, hlm. 37).

Sektor pertanian semakin lumpuh ketika dengan dalih menstabilkan harga, yang pada dasarnya demi kepentingan konsumen kota, pemerintah secara sistematis menekan harga beras dan merangsang petani untuk memproduksi lebih banyak lagi (HW Arndt (ed.), *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 19). Politik pembangunan yang demikian secara perlahan tapi

pasti menghancurkan pertanian dan sumber daya pedesaan yang lain.

Anjloknya harga gabah membuat etos kerja petani menjadi turun drastis, karena sektor pertanian menjadi tidak menguntungkan. Para pemilik tanah pun mengerjakan lahan tidak maksimal, upah buruh juga tetap rendah karena hasil pertanian tidak pernah meningkat. Ketika harga gabah tetap tidak dinaikkan sebagai bagian dari kebijakan penguasa untuk menghindari gejolak sosial, sementara harga pupuk terus menaik, maka sektor pertanian merupakan bidang yang terus merugi. Upah buruh pertanian juga tidak pernah naik secara signifikan.

Di satu sisi, hancurnya sektor pertanian ini mengakibatkan goncangan pada dunia kiai, karena kebanyakan kiai di pedesaan memiliki lahan pertanian yang luas. Menurunnya pendapatan kiai atau pesantren menyebabkan lembaga ini harus mencari sumber dana alternatif untuk biaya operasional pendidikan di pesantren. Proses demikian menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan pesantren, termasuk dalam perilaku politik kiai.

Sementara bagi masyarakat luas di pedesaan, di mana sebagian besar warga Nahdlatul Ulama menjadi komunitas di dalamnya, hancurnya sektor pertanian, sekurang-kurangnya sektor ini dianggap tidak menjanjikan karena tidak produktif, menyebabkan urbanisasi menjadi fenomena yang tidak terhindarkan. Ketika sektor pertanian tidak lagi mencukupi kebutuhan pokok masyarakat, maka wajar jika mereka mencari sumber penghasilan lain di luar pedesaan, yaitu dengan menjadi buruh pabrik atau industri di kota-kota. Namun karena tingkat pendidikan dan ketrampilan yang kurang memadai, sumber daya pedesaan tersebut pun hanya menjadi tenaga buruh murah – sebagaimana diinginkan oleh para penanam modal – dan tidak berdaya.

Menurut Hasyim Wahid, masalah besar kemudian muncul ketika ternyata pembangunan juga tidak cukup berhasil, bahkan negara terseret dalam krisis ekonomi yang serius. Kaum buruh pun menjadi rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), baik karena krisis ekonomi maupun rasionalisasi perusahaan untuk efisiensi. Ketika di-PHK, buruh tersebut tidak mungkin kembali ke desa, karena sektor

pertanian sama sekali tidak bisa diharapkan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang terlibat dalam tindak kriminal atau menjadi pekerja seks komersial bagi yang perempuan.

Sampai Orde Baru tumbang pada tahun 1998, kita tahu, bahwa politik pembangunan yang dijalankan lebih dari tiga dasawarsa relatif gagal. Tahap-tahap pembangunan yang dijalankan ala Rostowian hanya tinggal illusi. Perekonomian Indonesia pun menjadi semakin tergantung dan dikendalikan oleh sistem kapitalisme internasional. Ini terjadi karena pembangunan merupakan bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan kapitalisme global (Robert Biel, *The New Imperialism: Crisis and Contradictions in North-South Relations*, London-New York: Zed Books, 2000: 72-75).

Para elit mungkin tetap saja hidup enak dan berkecukupan, karena ideologi dan mentalitas dasarnya adalah hedonisme-masokhisme. Tetapi apa yang dijalankan itu telah menghancurkan jiwa, kepribadian, tradisi, nilai-nilai dan sumber daya masyarakat, terutama yang di pedesaan, tidak terkecuali warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat marhaen yang lain.

3. Fusi Partai Politik

Fase *ketiga* dari upaya penyingkiran NU adalah proyek politik berupa fusi partai. Proyek ini dirancang untuk mensukseskan program pembangunan di mana pemerintah waktu itu merasa tidak bisa mengandalkan partai politik yang jumlahnya masih banyak dan tidak semuanya mendukung pemerintah.

Untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan, Soeharto menempuh tiga strategi: (1) membentuk sebuah kelompok politik baru dalam DPR/MPR yang terdiri dari politisi non-partai yang komitmen terhadap program pembangunan pemerintah; (2) menyederhanakan partai politik melalui fusi; dan (3) membentuk sistem perwakilan korporatis (Mochtar Mas'oed, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 59).

Strategi yang pertama dimanifestasikan dalam revitalisasi Golkar, yang sampai akhir Orde Baru pun tidak disebut sebagai partai politik – meski bekerja sepenuhnya dalam kerangka dan fungsi kepartaian. Golkar menjadi mesin politik utama Orde Baru, selain militer dan birokrasi.

Strategi ketiga di antaranya dilakukan dengan membentuk organisasi-organisasi korporatis, seperti Majelis Ulama Indonesia (mewakili ulama), Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI (mewakili pemuda), Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau KORPRI yang mewakili pegawai negeri, dan masih banyak lagi.

Menurut Philippe C. Schmitter, seperti dikutip Mochtar Mas'oed, korporatisme adalah suatu sistem perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan keanggotaan, tidak saling bersaing, ditata secara hirarkis dan dibedakan menurut fungsinya; yang diakui atau diizinkan (kalau bukan diciptakan sendiri) oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidangnya sebagai imbalan atas kesediaannya mematuhi pengendalian pemerintah dalam hal pemilihan pemimpin dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan.

Sementara strategi kedua, yaitu penyederhanaan partai politik, dilakukan dengan menggabungkan partai-partai menjadi dua besar, yaitu partai-partai Islam digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan

partai-partai nasionalis dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dua partai politik ini dengan ditambah Golkar menjadi tiga kontestan tetap pemilihan umum selama Orde Baru, dengan urutan perolehan suara yang selalu sama, yaitu Golkar di nomor 1, PPP di urutan kedua, dan PDI di ranking ketiga.

Semula NU menolak fusi. Hal ini diputuskan pada Muktamar ke-25 di Surabaya tahun 1971. Namun, karena tekanan kuat dari pemerintah, deklarasi pembentukan PPP akhirnya ditandatangani pada 5 Januari 1973. Deklarasi ditandatangani oleh KH Idham Chalid dan KH Masykur (mewakili NU), HMS Minta-redja (Parmusi/ Masyumi yang diperbaharui), Anwar Tjokroaminoto (PSII) dan Rusli Halil mewakili Perti.

Dengan konstelasi dan *setting* politik seperti itu, secara otomatis kelompok Islam dan nasionalis tidak mendapat tempat dalam pusat-pusat kekuasaan Orde Baru, selain hanya menjadi hiasan politik belaka. Hal ini terjadi karena fungsi partai politik benar-benar dilumpuhkan, melalui intervensi pemerintah dalam pemilihan pemimpinnya, mekanisme *recall* bagi wakil partai yang vokal di legislatif, politik massa mengambang, pegawai negeri dilarang

menjadi anggota partai politik tetapi wajib menjadi anggota Golkar, dsb.

NU sebagai partai politik Islam terbesar pada waktu itu, yang menempati urutan kedua dalam perolehan suara Pemilu 1971 setelah Golkar, sangat dirugikan dengan fusi. NU yang dalam fakta sejarah terbukti sangat nasionalistik dalam pandangan dan sikap politiknya, misalnya dengan tidak pernah sama sekali terlibat dalam pemberontakan, justeru dipinggirkan.

Meski sebagian besar kelompok Islam, termasuk NU, disingkirkan secara sistematis dari desain besar politik Orde Baru, ada satu kelompok Islam yang secara perlahan menjadi *partner* Orde baru, yaitu kelas menengah Muslim kota yang kebanyakan merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau anggota Korps Alumni HMI (KAHMI).

Tulisan Ketua Umum PB HMI, Nurcholish Madjid (Cak Nur) tentang '*Islam Yes, Partai Islam No*' adalah setali tiga uang dengan strategi pembangunan Orde Baru yang berusahan menghilangkan watak ideologis dari partai-partai Islam. Dengan tulisan tersebut, Cak Nur membuka jalan lebar untuk melegitimasi eksistensi Golkar dan politik Orde Baru.

Beberapa tulisan tokoh HMI tersebut juga melegitimasi proses modernisasi dan pembangunan secara total dari sudut pandang Islam. Tulisan-tulisan tersebut antara lain, "Modernisasi ialah Rasionalisasi bukan Westernisasi" (1968), "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat" (1970), dan "Sekali Lagi tentang Sekularisasi" (1972).

Yang menarik, menurut catatan Greg Barton, Cak Nur semula adalah orang yang sangat anti-Amerika/Barat berubah 180 derajat membabi-buta dengan pendirian baru yang pro-Amerika/Barat. Ini terjadi setelah ia belajar di Universitas Chicago, AS. Bahkan menurut Cak Nur, Amerika lebih Islami dari masyarakat Islam yang pernah ia kenal, yakni dalam hal keadilan sosial, persamaan hak dan kesempatan (Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid,Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, alih bahasa Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina & Pustaka Antara, 1999, hlm. 80).

Perubahan sikap Cak Nur, memang bukan hal baru. Seperti disebutkan di atas, para pendahulunya dari kalangan Masyumi seperti Soekiman Wirjosandjojo dan Syafruddin Prawiranegara, juga

melakukan dan mengalami hal yang sama. Yaitu menjadi desertir intelektual, dari yang anti-Barat kemudian menjadi pendukung utama proyek-proyek dari Barat seperti pembangunan atau modernisasi.

Sejalan dengan kuatnya dukungan kelompok Masyumi (KAHMI) dan PSI terhadap pembangunan Orde Baru, NU sebagai kekuatan politik dan keagamaan pun semakin disingkirkan. Proses ini dipercepat dan diperparah dengan sikap NU yang cenderung oposan terhadap kebijakan pemerintah selama Orde Baru.

NU yang merupakan mayoritas di PPP menentang Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan yang diajukan pemerintah pada tahun 1973. Ketika P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan aliran kepercayaan dimasukkan dalam GBHN pada Sidang Umum MPR 1978, NU *walk-out*. Bahkan pada konferensi nasional tahun 1981 NU juga menolak mendukung Soeharto menjadi presiden ketiga kalinya dan penganugerahan gelar "Bapak Pembangunan" (Sidney Jones, "The Contraction and Expansion of the 'Umat' and the Role of Nahdlatul Ulama in Indonesia," *Indonesia*, Vol. 38, Oktober 1984: 11).

Puncak penyingkiran NU secara politik terjadi pada Pemilu 1982. Dalam pemilu tersebut, Ketua Umum PPP John Naro yang didukung pemerintah membabat habis politisi-politisi NU yang akan diajukan menjadi anggota DPR. Di level eksekutif, NU juga sama sekali tidak diberi jatah satu menteri pun, termasuk Menteri Agama yang sudah sejak lama menjadi langganan NU.

4. Penghancuran Politik NU: Pecah-Belah PKB

Ketika pada Pemilu 1999, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan NU mampu tampil sebagai juara ke-3, banyak pihak yang terperangah, dan iri. Perolehan suara PKB bahkan melebihi suara yang diraih partai-partai Islam "modernis". Melihat fakta ini, berbagai skenario pun dirancang untuk menghancurkan PKB, dan menghancurkan politik NU.

Pertama, mereka menurunkan paksa KH Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden dengan tuduhan terlibat *Buloggate* dan *Bruneigate*. Dalam proses hukum di pengadilan, kedua skandal itu tidak terbukti. Warga NU pun mafhum bahwa itu rekayasa dan bagian dari skenario besar menghancurkan politik NU.

Kedua, tidak berhenti sampai di situ, mereka kemudian menjalankan politik pecah belah PKB. Mereka mendukung PKB tandingan pimpinan Mathori Abdul Djalil. Muncullah dualism PKB, yaitu PKB Batutulis (pimpinan Mathori) vs PKB Kalibata (pimpinan Gus Dur). Upaya ini gagal.

Gagal memecah PKB dengan mendukung PKB Mathori, mereka kemudian mencoba memasukkan Saifulah Yusuf ke PKB. Saifullah dimasukkan pada Muktamar Luar Biasa (MLB) di Yogyakarta, Januari 2002. Waktu itu, Saifullah yang baru seminggu keluar dari PDIP langsung diplot sebagai Ketua Umum PKB. Wajar kiranya jika beberapa pengurus PKB menolak Saiful (*Kompas*, 31 Januari 2002). Selain melanggar asas kepatutan, karena baru seminggu keluar dari PDIP, Saiful juga sudah sejak lama melanggar Peraturan PBNU No 72/A-II.04.d/XI/1985 yang melarang pengurus harian NU mempunyai jabatan lain (rangkap jabatan) di partai politik.

Saifullah gagal menjadi Ketua Umum PKB. Tapi ia berhasil dipaksakan menjadi Sekjen DPP PKB. Namun, selama menjabat sebagai Sekjen PKB, Saiful melakukan berbagai pelanggaran, seperti dinyatakan AS Hikam (*Jawa Pos*, 5 Juli 2003). Ia

sering berseberangan dengan Ketua Dewan Syura. Gus Dur yang sudah lama bersabar akhirnya menyerahkan Saifullah kepada mekanisme partai. Akhirnya Saiful direposisi dari jabatan Sekjen.

Setelah upaya memecah-belah PKB dengan memasukkan Saifullah Yusuf gagal, kemudian dirancang skenario memecah PKB dengan mendukung beberapa kiai Langitan untuk melawan PKB yang sah, sampai akhirnya berdirilah PKNU. Setelah PKNU juga gagal, kemudian di *injury time* menjelang Pemilu 2009, mereka masih berusaha menghancurkan PKB dengan membenturkan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Dan upaya ini juga gagal, karena bagi yang paham cara mendidik Nabi Hidir terhadap Nabi Musa AS, maka kader PKB-NU tulen akan paham bahwa tidak pernah ada masalah antara Gus Dur dan Cak Imin.

5. Skenario Penghancuran Politik NU: Memisahkan NU dari PKB

Skenario baru yang mereka jalankan untuk menghancurkan dan menyingkirkan NU adalah dengan memecah-belah dan memisahkan NU dari PKB. Dengan alasan khittah, mereka berusaha agar NU menjadi ormas yang terbuka dan

bisa bertransaksi dengan semua partai. Inilah skenario politik yang sangat merusak dan menghancurkan NU, yang sayangnya kadang-kadang dijalankan dengan bangga – tetapi tanpa kesadaran dan kecerdasan yang memadai – oleh beberapa pengurus NU sendiri.

Sudah jelas bahwa PKB didirikan oleh NU. Dan Muktamar NU di Lirboyo Kediri memustuskan bahwa NU akan menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB. Kalau ada pengurus NU menafsirkan lain atas fakta sejarah dan fakta hukum ini, maka bisa dipastikan dia terjerumus masuk ke dalam skenario luar yang bertujuan menghancurkan NU.

Itulah beberapa fase sejarah penyingkiran NU, suatu skenario sistematis yang masih berlangsung sampai saat ini.

- 4-

KEGAGALAN IDEOLOGI LIBERAL ANTI-NU

A. Carut-Marut Republik

Masalah Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara adalah tidak adanya akumulasi dalam semua proses "perjalanan menjadi" bangsa dan negara. Tidak adanya akumulasi itu tidak hanya secara ekonomi (misalnya karena surplus ekonomi selalu dibawa keluar), tetapi juga secara politik (karena politik Indonesia tidak pernah menjadi transformasi kultural), struktur pengetahuan (karena struktur pengetahuan bangsa ini adalah "cangkokan" struktur pengetahuan kolonial) dan mental kolektif bangsa (karena mentalitas bangsa ini tetap *inlandeer*).

Di sektor ekonomi misalnya, pembangunan yang dijalankan selama ini tidak pernah menghasilkan suatu tingkat kesesejahteraan rakyat secara luas dan nyata, tetapi justeru menciptakan kesenjangan di dalam masyarakat sendiri. Pembangunan juga hanya mengakumulasi hutang negara yang semakin besar.

Ironisnya, ketika pembangunan tidak berhasil, para ekonom dan intelektual yang dulu dan selama ini memperjuangkan teori-teorinya, tidak pernah mau mengoreksi kegagalan teorinya itu, tetapi justeru mempertahankannya dengan menyatakan bahwa kegagalan pembangunan bukan karena kekeliruan teori, tetapi karena mentalitas masyarakat yang tidak mau membangun, karena etos yang tidak tumbuh.

Dalam struktur pengetahuan yang terjadi juga sama. Pengetahuan selalu menjadi komoditas di kalangan kaum terdidik, bukan sebagai alat transformasi. Komodifikasi pengetahuan tidak jauh berbeda dengan komodifikasi barang dan jasa. Struktur pengetahuan, karenanya, merupakan subordinasi dari struktur pasar dalam ekonomi.

Komodifikasi pengetahuan ini mempunyai dua implikasi sekaligus. *Pertama*, pengetahuan di

kalangan kaum terdidik bukanlah sesuatu yang berangkat dari kenyataan, tetapi jauh dari kenyataan. Sekalipun rakyat kelaparan dan penuh tekanan, struktur pengetahuan kaum terdidik tetap saja bisa memberikan rasionalisasi bahwa ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan rakyat, misalnya soal etos. *Kedua*, pengetahuan justeru menjadi alat teror bagi kaum elit untuk membuat rakyat sepenuhnya patuh pada kehendak elit, dengan sukarela.

Karena tidak pernah terjadi akumulasi, bangsa ini tidak pernah memiliki pandangan dunia kolektif yang kokoh dan mengakar. Pragmatisme dan oportunisme tumbuh subur menjadi semacam ideologi *mainstream* di kalangan elit. Sistem ekonomi dan politik yang ada, sebagai contoh, selalu mengalami bongkar-pasang yang tidak jelas arahnya. Yang jelas hanya satu: bongkar-pasang itu selalu menguntungkan kelompok elit (berikut para "bos"-nya) dan secara nyata merugikan rakyat secara luas, sekurang-kurangnya tidak pernah ada sangkut-pautnya dengan kepentingan rakyat.

Kemerdekaan yang seharusnya menjadi titik awal bagi proses bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bebas dari semua bentuk

intervensi asing yang bersifat eksploitatif, dominatif dan hegemonik, justeru menjadi jembatan bagi berlanjutnya proses-proses dehumanisasi itu. Kemerdekaan Indonesia tidak lagi menjadi awal bagi upaya untuk mengembangkan diri berdasarkan kapasitas internal yang dinamis, mengakar secara kuat dalam "ruang batin" masyarakat setempat.

Kemerdekaan Indonesia tidak pernah menghadirkan suatu proses budaya, ekonomi dan politik yang bersifat akumulatif. Kemerdekaan juga tidak menghasilkan tegaknya suatu kedaulatan yang ditopang oleh harga diri dan percaya diri kolektif yang produktif.

Indonesia memang sedang berada dalam carut-marut sistem (*systemic chaos*). Suatu keadaan di mana bangsa ini tidak memiliki kapasitas institusi yang memungkinkan ia menjadi – meminjam istilah Karl Jaspers – tidak sekadar "hidup" (*to live*) tetapi juga "ada" (*to exist*) – "hidup" bermakna pasif dan menjadi objek dari proses eksploitasi dan dominasi, sedang "ada" bermakna aktif dan menjadi subjek. Suatu keadaan yang akan membawanya semakin mundur dan tenggelam.

B. Tiga Eksperimen yang Gagal

Berikut ini saya tunjukkan sebuah proyek besar di Republik ini sebagai eksperimentasi elit untuk "mengisi kemerdekaan", namun dengan tujuan mempertahankan statusnya sebagai elit, sekaligus meraup keuntungan ekonomi dan politik yang berkelanjutan.

Sejak Indonesia "merdeka" pada tahun 1945, setidaknya sudah ada tiga eksperimen besar untuk membangun bangsa pasca-kemerdekaan, yaitu revolusi (Sosialisme, Kiri, Orde Lama), evolusi (Kapitalisme, Kanan, Orde Baru) dan reformasi (Neo-Liberalisme). Seperti akan terlihat nanti, misi ketiganya gagal. Sayangnya banyak yang tidak menyadari kegagalan itu, sehingga pekerjaan rutin bangsa ini adalah mengulangi kegagalan.

- ***Eksperimen 1: Sosialisme Orde Lama (Kiri)***

Kegagalan demokrasi liberal yang diidealkan oleh kubu Hatta dan Syahrir mendorong Sukarno untuk memberlakukan demokrasi terpimpin. Berbeda dengan Hatta dan Syahrir yang pro-Barat, kebijakan Sukarno didesain untuk

membebaskan Indonesia secara total dari pengaruh dan intervensi Barat.

Pandangan politik anti-liberal itu dibangun di atas asumsi yang menganggap bahwa revolusi belum selesai. Karena itu, pada masa Orde Lama, para pemimpin membawa slogan revolusi. Rakyat dipaksa mengikuti retorika elit untuk mensukseskan revolusi.

Eksperimen revolusi dimulai pada Desember 1957, ketika dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing (Belanda). Beberapa prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendapat tugas untuk mengambil alih perusahaan asing itu (Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*, North Sydney: Allen & Unwin, 1986, hlm. 251)

Segera setelah itu, Nasution menginstruksikan agar perusahaan yang dinasionalisasi berada di bawah pengawasan dan penguasaan Angkatan Darat. Pada 1958 ketika perusahaan-perusahaan asing itu diintegrasikan ke departemen-departemen pemerintah, Nasution meminta persyaratan agar para perwira senior atau yang tidak memiliki tugas supaya disalurkan ke dalam kedudukan manajemen perusahaan-perusahaan itu. Nasution juga menginstruksikan agar perwira-

perwira yang secara administratif bertanggung jawab pada pelaksanaan UU Darurat Perang itu di masukkan ke dalam dewan manajemen perusahaan-perusahaan asing (Farchan Bulkin, "Negara, Masyarakat dan Ekonomi", *Prisma*, No. 8, 1984: 14).

Sayang, usaha untuk membangun ekonomi bangsa dengan kekuatan sendiri itu justeru menjadi awal terjadinya korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh penguasa.

Karena kontradiksi internal dan sekaligus rekayasa dari pihak luar, janji revolusi tidak terpenuhi. Bahkan kehidupan rakyat benar-benar susah dalam segala segi. Jelaslah bahwa eksperimen revolusi atau sosialisme gagal!

- *Eksperimen 2: Pembangunan Orde Baru (Kanan)*

Pembangunan model liberal (evolusi) sesungguhnya sudah dicoba pada awal-awal masa revolusi kemerdekaan. Ketika itu, pemikiran Hatta dan Syahrir yang pro-Barat (*economic minded*) sangat mewarnai perjalanan bangsa, meski akhirnya Hatta harus mengakui bahwa eksperimennya gagal, karena "partai-partai tidak dewasa".

Orde Baru adalah rezim yang mendasarkan diri pada pembangunan pola evolusi (Rostowian), yaitu kapitalisme atau liberalisme atau developmentalisme. Pembangunan ekonomi politik Orde Baru sepenuhnya dirancang sesuai dengan pola-pola Barat atau *pro-Western market economy* [Anthony Reid, "Indonesia Upheaval (1965-1966)", dalam Jack A Goldstone (ed.), *The Encyclopedia of Political Revolution,* Chicago & London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1998, hlm. 239-240] – sebagaimana diidealkan oleh Hatta, kaum PSI dan Masyumi pada masa pasca kemerdekaan. Pembangunan, dengan demikian, adalah kebijakan Barat di Indonesia.

Pada putaran awal, untuk sementara kebijakan liberal ini menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Karena itu, rakyat diminta mendukung pembangunan. Siapapun yang melawan pembanguan akan dituduh sebagai subversif atau komunis. Para petani juga diminta untuk mendukung industrialisasi. Nanti kalau industrialisasi berhasil, maka pembangunan pada putaran berikutnya akan difokuskan untuk sektor pertanian. Sementara pertanian dikalahkan untuk industrialisasi.

Belum satu putaran lewat, pada akhir 1990-an, kehancuran datang tiba-tiba. Prediksi bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi Asia ternyata meleset. Sektor pertanian yang tadinya dikalahkan untuk industri semakin terpuruk.

Para ideolog dan ekonom pendukung liberalisme seolah cuci tangan atas kegagalan model pembangunan Orde Baru. Kambing hitam pun dicari. Siapapun kambing hitampanya, sangat jelas bahwa eksperimen liberalisme (kapitalisme) gagal di Indonesia, bahkan membawa bangsa ini jauh lebih miskin dan sengsara dibanding 30 atau 50 tahun yang lalu. Nyatalah bahwa eksperimen evolusi (Kanan) juga telah gagal total.

- ***Eksperimen 3: Reformasi (Neo-liberalisme)***

Kemudian datanglah rezim reformasi yang melanjutkan rezim Orde Baru. Kegagalan revolusi dan pembangunan menjadi pelajaran berharga bagi proses reformasi. Kebebasan, demokrasi, *civil society*, supremasi hukum dan penegakkan hak asasi manusia menjadi acuan utama gerakan reformasi. Privatisasi BUMN, penghapusan subsidi dan liberalisasi perdagangan juga diikuti tanpa menghitung nasib bangsa di

masa depan. Prinsipnya pasrah total kepada keinginan rezim neo-liberal. *Mati gesang nderek neolib*. Hidup atau mati ikut neoliberalisme.

Semakin patuh kita mengikuti agenda neoliberal (privatisasi, penghapusan subsidi dan liberalisasi perdagangan), maka bangsa ini akan semakin miskin dan menderita. Dengan tingkat kebebasan yang sama dan kompetisi yang terbuka, tidak mungkin negara yang kaya dengan hutang ini bisa mengikuti irama perubahan dan restrukturisasi yang diagendakan oleh kapitalisme global. Setiap kali terjadi krisis dalam sistem kapitalisme global, maka siap-siaplah bangsa ini akan menjadi pihak pertama yang dikorbankan.

Tiga eksperimen untuk "mengisi" kemerdekaan, yaitu revolusi (kiri, komunis atau nasakom), pembangunan (kanan, liberal) dan reformasi (tengah, neo-liberal), semuanya bisa dikatakan gagal. Mengapa gagal? Karena semua dilakukan di atas ideologi yang dicangkok atau diimpor dari luar. Karena semua serba impor, maka ideologinya tidak jelas, kosong, dan selalu berubah-ubah.

C. Negara tanpa Ideologi

Meski sudah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, sampai saat ini, negara yang bernama Republik Indonesia tidak memiliki ideologi yang jelas dan kokoh. Apa dasar ideologi politik negara Indonesia (apakah sekular atau teokrasi, atau tidak kedua-duanya, bagaimana nasib amandemen pasal 29 UUD 1945), apa ideologi ekonomi kita (sosialisme atau kapitalisme, atau sosialisme-demokratis, bagaimana dengan pasal 33 UUD 1945), apa sistem permerintahan kita (presidensiil atau parlementer, atau bukan kedua-duanya)? Tidak jelas. Ada dua implikasi ekonomi-politik penting dari "kekosongan" ideologi ini.

Implikasi 1: Didikte oleh Bangsa lain

Karena tidak memiliki ideologi yang jelas, apapun bisa diusulkan dan dilakukan di Indonesia. Sayangnya yang dijalankan dan diusulkan adalah sampah-sampah peradaban lain, sehingga kita menjadi tempat pembuangan sampah-sampah ideologi besar di dunia, ketika ideologi itu sedang direstrukturisasi. Setiap kali ada restrukturisasi ekonomi dunia (di negara-negara Dunia Pertama),

setiap kali itu pula Indonesia harus ikut menanggung akibatnya.

Ke mana ekonomi, politik dan budaya Indonesia akan bergerak dan berjalan, tidak pernah jelas! Selain hanya mengikuti pola-pola umum yang telah ditentukan dan didiktekan oleh pihak lain!

Implikasi 2: Negara, Alat Tiran Internasional

Kalau negara-negara maju adalah alat para pemilik modal (korporasi transnasional) untuk memaksakan kepentingannya kepada negara lain, maka – karena tidak memiliki ideologi yang jelas dan kokoh – negara-negara Dunia Ketiga (dan Indonesia tentunya) adalah alat bagi dua aktor sekaligus: 1) negara-negara maju, dan 2) korporasi transnasional. Kepentingan tiran internasional adalah mengeksploitasi sumber-sumber sosial, politik dan ekonomi lokal, dan sekaligus merepresi masyarakat non-elit, yaitu komunitas-komunitas pinggiran, seperti petani, buruh, konsumen, perempuan, dsb.

D. Memahami Kembali Indonesia: Perspektif NU

Karena ada masalah dengan ketidakpuasan terhadap berbagai pendekatan dan cara pandang yang selama ini digunakan untuk memahami Indonesia, maka NU mengunakan model pendekatan "sejarah baru" yang tidak akan melihat Indonesia secara deskriptif, naratif, kronologis atau ensiklopedis, tetapi melihat dan memahmi Indonesia dari apa yang bisa disebut sebagai gerak struktur sejarah, di mana "struktur luar" dan "struktur dalam" bangsa ini dibentuk dan saling mempengaruhi.

Dalam cara pandang demikian, *pertama*, NU melihat Indonesia tidak sebagai sebuah substansi, tetapi sebagai produk relasi yang tidak berdiri sendiri, dilihat dalam kerangka sejarah dunia pada umumnya. *Kedua*, memahami mentalitas yang mendasari dan membentuk struktur dalam waktu yang lama (*long duree*).

Hal pertama yang harus dilakukan adalah pemantapan ideologi (*aqidah*) nasional yang kokoh untuk menjelaskan dan menyatukan Indonesia. Dalam konteks ini, Proses ideologisasi melalui reinterpretasi ideologi nasional perlu dilakukan. Menurut Abdurrahman Wahid

(2000), hakikat ideologisasi adalah pencarian akan makna ideologi sebagai kekuatan pengikat dalam hubungan baik antara warga negara secara perorangan maupun kelompok di satu pihak dan negara di pihak lain.

Diperlukan revitalisasi proses-proses kehidupan berbangsa dengan perspektif kebudayaan yang bersumber pada nilai-nilai luhur agama dan budaya. Pendidikan kehilangan arahnya, karena semata-mata mengejar ukuran formal, tanpa sentuhan budaya dan agama. Politik kita juga berkembang menjadi ajang transaksi tanpa transformasi, karena tidak ada sentuhan agama dan budaya. Ekonomi juga sebatas mengurusi angka-angka statistik pertumbuhan dan inflasi, tanpa sentuhan agama dan budaya, sehingga seringkali rakyat sengsaran akibat angka.

Dengan cara pandang dan titik berangkat seperti NU, ada harapan besar bangsa ini bisa bangkit dan maju dengan tanpa kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat dan berperadaban tinggi. Dan ini hanya bisa dilakukan jika pembangunan bangsa menggunakan cara-cara NU dan dijalankan konsisten seperti karakter tokoh-tokoh NU yang lahir batin mengabdi untuk negeri.

- 5 -
KARAKTER ELIT-ELIT INDONESIA NON-NU

A. Sejarah Elit di Indonesia

Kalau ditelusuri, sejarah elit (politik) Indonesia modern dimulai pada masa kolonial, tepatnya penjajahan Belanda. Diakui atau tidak, Belanda adalah negara yang mengenalkan kepada Indonesia sistem politik dan birokrasi modern. Sebelum Belanda datang, sistem birokrasi di Nusantara adalah birokrasi tradisional yang dijalankan dalam sebuah sistem yang feodal.

Namun, diterapkannya sistem birokrasi modern di Nusantara itu bukan dengan tujuan untuk memajukan bangsa dan meningkatkan pelayaan kepada rakyat, tetapi justeru untuk mengefektifkan kebijakan ekonomi dan politik

Belanda dalam mengeksploitasi kekayaan bumi Nusantara sekaligus melakukan kontrol efektif terhadap rakyat sehingga eksploitasi besar-besaran tidak mendapat rintangan yang berarti.

Karena keterbatasan sumber daya manusia, Belanda terpaksa memanfaatkan orang-orang pribumi untuk menjalankan roda birokrasi pemerintahan. Sebagian orang pribumi yang diajak masuk dalam pemerintahan itu adalah para elit lama yang sebelumnya menguasai birokrasi tradisional, namun sebagian adalah orang-orang baru yang – secara sukarela atau dipaksa – masuk dalam sistem pemerintahan kolonial. Orang-orang pribumi yang menjadi pejabat kolonial itu biasa disebut sebagai *pangreh praja* atau pegawai bumiputra (*Inlandsch Bestuur*).

Seharusnya, *pangreh praja* merupakan aparat birokrasi yang bekerja sebagai abdi masyarakat. Namun akibat tekanan dan kebijakan politik pemerintah Belanda, mereka lebih memilih menjadi abdi pemerintahan penjajah (*ambtenaar*). Mereka menjadi bawahan dan bertanggung jawab kepada para penguasa Belanda di daerah (*resident*) dan mereka juga menerima gaji dari pemerintah kolonial.

Bagi para *pangreh praja*, pilihan menjadi abdi pemerintah kolonial membawa keuntung-an politik, ekonomi dan sosial. Secara politik mereka aman karena jabatannya sebagai abdi pemerintah kolonial menjadikan mereka kelompok yang bebas dari eksploitasi penjajah, misalnya melalui tanam paksa atau kerja paksa. Mereka aman secara ekonomi karena di saat rakyat kebanyakan dieksploitasi secara ekonomi, para *pangreh praja* justeru bisa menumpuk harta yang banyak, melalui korupsi dan penyalahguaan wewenang. Dan mereka juga aman secara sosial, karena di saat rakyat kecil diperlakukan diskriminatif secara sosial – karena salah kebijakan kependudukan Belanda adalah menempatkan rakyat pribumi sebagai warga negara kelas tiga atau dikategorisasikan sebagai orang asing di negeri sendiri – , kelompok *pangreh praja* justeru bisa "naik kelas" dan relatif bebas dari diskriminasi.

Itulah sejarah dan asal-usul elit politik Indonesia modern yang tampaknya belum berubah sampai sekarang. Sejak dari zaman kolonial, elit merupakan kelas atas dalam dalam masyarakat yang orientasi dan komitmen hidupnya adalah mengabdi kepada kekuasaan (termasuk mengabdi kepada bangsa asing) untuk

memperkaya diri sendiri dan meningkatkan status sosial, meski hal itu dilakukan dengan menindas bangsa sendiri, mengeksploitasi rakyat di bawah.

Dan dari asal-usul seperti itulah muncul kesenjangan antara dunia politik yang dimiliki oleh elit dan dunia kenyataan yang dimiliki oleh rakyat kebanyakan. Dalam asumsi sebagian rakyat, dunia politik bukan milik mereka dan bukan untuk mereka, tetapi untuk para elit yang memiliki kekuasaan dan uang.

B. Elit di Masa Kolonial dan Demokrasi

Melihat realitas politik saat ini, sepertinya mentalitas politisi *pangreh praja* seperti pada zaman kolonial masih hidup subur di kalangan politisi kita. Yaitu mentalitas mengabdi kepada kekuasaan yang intinya adalah mengabdi kepada kepentingan atasan (termasuk bangsa asing) dan sekaligus memperkaya diri sendiri tanpa peduli kepentingan rakyat banyak.

Bagi elit politik, tujuan utama menjadi politisi adalah menumpuk harta atau memperkaya diri sendiri. Itu dilakukan dengan berbagai cara, meski harus mengorbankan rakyat yang telah memilihnya, menjual bangsa dan meminta-minta kepada bangsa asing. Menumpuk harta

sebanyak-banyaknya menjadi "ideologi" utama kelompok elit, karena dengan harta mereka bisa berbuat banyak hal untuk mempertahankan posisinya. Dengan harta itu juga ia merasa aman jika sewaktu-waktu harus kehilangan kekuasaan atau posisinya. Hal ini tentu berbeda dengan karakter politisi NU yang niat dan tujuan berpolitiknya adalah ibadah dan berkhidmah kepada ummah.

Mengapa mentalitas politisi *pangreh praja* zaman kolonial tetap hidup di kalangan elit dan politisi kita? Ada banyak jawaban yang bisa dikemukakan. *Pertama*, pada umumnya, secara genealogis elit di Indonesia berasal (atau merupakan anak cucu) dari elit sebelumnya. Elit sebelumnya itu berasal dari elit sebelumnya lagi sampai pada para *pangreh praja* sebagaimana disebutkan di atas. Karena mempunyai keterkaitan genealogis dan psiko-historis, maka menjadi lumrah kalau mentalitas elit saat ini sama dengan mentalitas elit-elit sebelumnya.

Kedua, secara faktual sistem pendidikan Indonesia, di samping dinikmati oleh kelompok elit (khususnya pendidikan tingginya), juga lebih menciptakan manusia elit daripada "manusia biasa". Pendidikan di Indonesia secara umum

menciptakan mentalitas elitis, sehingga elit terdidik yang dihasilkan menjadi tidak peka terhadap kepentingan rakyat bawah dan semakin terasing dari realitas kehidupan rakyat. Bandingkan dengan pendidikan pesantren yang sangat membumi dan populis.

Ketiga, mentalitas *pangreh praja* juga tetap hidup di kalangan politisi kita karena secara sistem sosial, politik, ekonomi dan kultural Indonesia saat ini masih belum berubah dari sistem kolonial dahulu. Contoh yang paling gampang adalah hukum di Indonesia yang masih merupakan warisan Belanda. Dalam sietem ekonomi juga masih terjadi dualisme sistem ekonomi seperti yang terjadi pada zaman kolonial, sebagaimana ditulis oleh JH Boeke.

- ***Fakta 1: Elit sebagai "Compradorized Groups"***

Karakter khas elit (kaum intelektual, politisi, pejabat pemerintah, ekonom, dsb.) di negara-negara yang pernah dijajah atau negara Dunia Ketiga adalah kecenderungannya untuk menjadi pelayan, agen, makelar, jurubicara dan sekaligus pembela kepentingan-kepentingan kolonial (asing). Elit cenderung menjadi kelas yang

secara sengaja, sukarela dan total mengabdi kepada kepentingan bangsa asing atau disebut *compradorized groups* (Wil Hout, *Capitalism and the Third World: Development, Dependence and the World System*, Edwad Elgar Publishing, 1993, hlm. 91). Semakin besar kepentingan kolonial di Dunia Ketiga, semakin besar pula jumlah elit yang mengabdi kepadanya, dan semakin tidak berdaya elit di hadapan kepentingan raksasa itu.

Elit di Dunia Ketiga yang merupakan minoritas menggantungkan dan mengabdikan diri pada kepentingan imperialisme (negara, perusahaan transnasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional) untuk mempertahankan kekuasaan, keuntungan dan *privileges*nya. Sebagai kompensasinya, kaum elit bisa menikmati kekuasaan, menumpuk kekayaan dan naik status sosialnya dengan predikat modern, *civilized*, demokratis dan standar-standar Barat yang lain.

Di sisi lain, filsafat dasar elit dalam berpolitik adalah mentransformasikan "kepentingan nasional", atau "solidaritas kolektif bangsa" ke dalam kolaborasi dan sekaligus subordinasi dengan makroekonomi neoliberalisme, dengan menggunakan mekanisme *self-exploitation of the*

poor (James Petras & Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*, London & New York: Zed Books, 2001, hlm. 135-136). Melalui isu demokrasi, *civil society*, hak-hak asasi manusia, pengentasan kemiskinan, kredit untuk petani, penghijauan dan pembangunan sektor pertanian, gender, untuk menyebut beberapa contoh, kaum miskin dan masyarakat pinggiran dipaksa untuk melakukan eksploitasi diri demi kepentingan elit lokal dan kapitalisme global.

Karena itu, solusi-solusi yang diberikan oleh elit, kaum terpelajar dan politisi selalu saja solusi yang dirancang untuk mempertahankan kepentingannya sebagai kelas elit, tanpa peduli apa persoalan mendasar bangsa dan rakyat secara keseluruhan. Bahasa-bahasa dan simbol kerakyatan (populisme) sering digunakan secara fasih untuk menutupi kepentingan aslinya itu.

Pada masa reformasi pasca Orde Baru misalnya, sejumlah elit dari kalangan Islam mengusulkan untuk kembali memasukkan Piagam Jakarta dalam Pasal 29 UUD 1945, sebagai semacam solusi atas "kekosongan ideologi" di Indonesia. Usulan ini bukan saja menambah kekacauan sistem politik

yang sudah kacau, tetapi juga menunjukkan bahwa apa yang dipikirkan elit hanya merupakan ilusi yang tidak pernah terkait dengan kenyataan kehidupan masyarakat.

Carut-marut bangsa, dengan demikian, salah satu sumber utamanya adalah mentalitas elit yang tidak pernah memahami kenyataan bangsa sendiri, karena mereka adalah pada desertir yang elitis dan tidak konsisten.

- ***Fakta 2: Desersi Intelektual, Bunuh Diri Ideologis Kaum Elit***

Kenyataan sejarah yang juga sangat penting tapi ironis yang menandai perjalanan sejarah bangsa ini pasca kemerdekaan adalah terjadinya bunuh diri kolektif kaum elit secara ideologis. Terjadi desersi intelektual. Kaum terpelajar dan elit pejuang kemerdekaan dan revolusi Indonesia yang semula membangun kapasitas resistensi lokal dengan mengembangkan ideologi anti-kapitalisme-liberalisme – karena ideologi ini dianggap penopang ekspansi imperialisme – secara mudah melakukan bunuh diri ideologis menjadi pendukung dan menghamba pada ideologi ini. Elit yang semula berideologi sosialisme demokratik atau Islam berganti kelamin menjadi

pendukung liberalisme-kapitalisme yang militan. Kita sudah tahu, bahwa baik yang sosialis (Kiri) maupun kapitalis-liberal (Kanan) sama-sama gagal membangun Indonesia.

Sebagai sebuah pilihan pribadi, pilihan untuk berganti kelamin ideologi merupakan hal yang wajar. Meski hal itu sangat jelas menunjukkan sikap tidak konsisten, hal itu juga masih manusiawi. Namun dalam kapasitas mereka sebagai kelas elit, apa yang dilakukan itu jelas menjadi sebuah "dosa sejarah" yang sangat besar (jauh melebihi dosa besar dalam agama), karena pilihan kolektif itu menjadikan kemerdekaan Indonesia justeru menjadi awal bagi ketidakmerdekaan bangsa ini. Bunuh diri ideologis kaum elit itu justeru menjadi pembuka bagi "penjajahan" atau imperialisme pasca-kolonial secara tidak langsung di mana mereka, disadari atau tidak, menjadi agen dan pelayan yang setia.

Sebagai contoh adalah kelompok PI, PSI dan Masyumi. Simak misalnya pernyataan asas (*beginsel verklaring*) Perhimpunan Indonesia – organisasi pelajar Indonesia di Nederland – pada 3 Maret 1923: *"Masa depan Indonesia sepenuhnya bergantung pada susunan pemerintahan*

berdasarkan kedaulatan rakyat. Untuk mencapainya, setiap orang Indonesia harus berjuang sesuai kemampuan dan bakatnya, dengan tenaga dan kekuatannya sendiri."

Pernyataan politik PI di atas adalah contoh bagaimana para pejuang kemerdekaan Indonesia berganti ideologi. Ketika pernyataan itu disampaikan tahun 1923, PI adalah organisasi nasionalis yang anti terhadap segala bentuk bantuan dari pihak asing. Namun, setelah Indonesia merdeka, tokoh-tokoh PI seperti Hatta dan Soekiman Wirjosandjojo (yang juga tokoh Masyumi) berbelok menjadi pendukung bantuan asing dalam pembangunan ekonomi (*economic minded* – dalam istilah Benjamin Higgins), atau dari pendukung paham sosialis demokrat (sosdem) ke liberal.

Higgins sendiri membagi elit Indonesia pasca kemerdekaan menjadi dua; 1) *economic minded*, yaitu para intelektual berpendidikan Barat yang berpendirian bahwa pembangunan ekonomi harus mengikuti pola pembangunan Barat, termasuk didalamnya adalah perlunya modal asing untuk mengembangkan ekonomi nasional; 2) *history minded*, yaitu kaum nasionalis dan komunis yang menganggap bahwa revolusi belum

selesai, dominasi ekonomi Barat harus diakhiri, modal dan budaya asing harus disingkirkan sebagai dasar pembangunan nasional (Higgins, *Indonesia's Economic Stabilization and Development*, New York: Institute of Pasific Relations, 1957: 103-104).

Kebijakan untuk mengundang modal asing pertama kali diambil oleh Syafruddin Prawiranegara, ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Natsir. Kabinet Soekiman kemudian melanjutkan kebijakan pro-Barat, karena sikap dasarnya yang anti-komunis (Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York: Cornell University Press, 1964, hlm. 182-207).

Pada masa Demokrasi pemimpin, tokoh-tokoh Masyumi dan PSI yang pro Barat tenggelam bersamaan dengan menguatnya aliran pemikiran ekonomi-politik anti-Barat dan cenderung bekerjasama dengan blok-Sosialis. Namun pada masa Orde Baru, alur pemikiran ekonomi-politik liberal-kapitalis (Kanan) yang pernah dirintis oleh Masyumi dan PSI itu dihidupkan kembali, dua kelompok inilah yang – bersama tentara – mengendalikan Orde Baru.

Contoh lain, adalah "Mafia Berkeley". Simak misalnya, Pernyataan Widjojo Nitisastro dalam buku yang ditulis bersama Nathan Keyfitz (1952: 112), seperti dikutip oleh Elxander Irwan, "Menuju Abad 'Governance': Widjojo Muda, Widjojo Tua, Panglaykim, dan Sarbini", dalam *Seribu Tahun Nusantara*, Jakarta: Kompas, 2000, hlm. 615-616:

> *Bantuan atau pinjaman dari luar negeri memang merupakan satu kesempatan, tetapi*

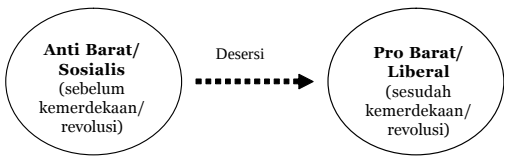

> *terang kiranya bahwa hal ini amat terbatas. Lagi pula tidak pada tempatnya apabila pembangunan ekonomi suatu negara merdeka disandarkan pada bantuan dari negara asing.*

Ketika masih menjadi mahasiswa ekonomi Universitas Indonesia, Widjojo Nitisastro adalah seorang "aktivis" mahasiswa Sosialis yang – sebagaimana umumnya aktivis PSI pra kemerekaan – sangat anti-Barat. Pernyataan-nya bahwa meminta bantuan asing untuk pembangunan ekonomi negara

yang baru merdeka adalah sesuatu yang tidak pantas, seperti dikutip di atas, merupakan bukti nyata bahwa ia adalah seorang Sosialis (PSI) tulen. Sepuluh tahun kemudian, setelah ia selesai kuliah di University of California Berkeley (AS), ia melakukan "bunuh diri ideologis" menjadi pengikut aliran liberal yang pro-Barat.

Sebagimana yang terjadi pada kasus Widjojo, kebanyakan ekonom dan ilmuwan politik Indonesia dengan serta merta berubah menjadi Liberal setelah mereka sekolah di Amerika Serikat. Ada kecenderungan untuk bersikap pragmatis di kalangan alumni sekolah AS dalam hal politik, ekonomi dan budaya. Hal sangat wajar bila kita melihat bahwa mazhab filsafat pragmatisme adalah lahir di AS. Pragmatisme – yang menolak dasar-dasar epistimologi filsafat klasik misalnya tentang adanya "esensi" – mempunyai pengaruh yang menyeluruh dalam filsafat ilmu, masyarakat, demokrasi, hukum, pendidikan, khususnya dalam ekonomi Amerika (Paul D Bush, "Pragmatism", dalam Philip Anthony O'Hara (Ed.), *Encyclopedia of Political Economy*, London & New York: Routledge, 2001, Vol. II, hlm. 894).

Disadari atau tidak, perpindahan pelan-pelan dari idelogi Sosialisme ke Liberalisme merupakan pengaruh dari filsafat pragmatisme yang menjadi ciri khas pendidikan di AS. Lebih dari itu, menjadi Liberal jauh lebih menguntungkan dilihat dari sisi status sosial dan keuntungan materi yang bisa didapatkan, daripada melawan Liberalisme. Ilmuwan politik atau ekonomi yang anti-liberal di Indonesia kebanyakan adalah "kaum miskin", dan itu menjadi pantangan bagi mereka yang sudah belajar di negara super power. Kalau bisa kaya dengan menjadi Liberal, mengapa harus repot miskin?

Para ahli ekonomi dan politik beraliran Liberal dari Universitas (UI) Indonesia dan Gajah Mada (UGM) – yang mayoritas dalah alumni perguruan tinggi AS – misalnya, seringkali tidak bisa bersifat kritis selain hanya menerima dan menjalankan apa-apa yang telah digariskan oleh dunia ekonomi dan politik AS. Privatisasi, liberalisasi perdagangan, penghapusan subsidi, globalisasi, demokrasi, *civil society*, penegakkan HAM dan supremasi hukum dianggap sebagai "nilai-nilai utama" yang harus diperjuangkan, sebagaimana Amerika dan Barat telah melakukannya. Mereka sama sekali tidak bisa menembus kepentingan

tersembunyi di balik agenda-agenda itu. Prestasi mereka yang bisa sekolah di Barat, bisa bergaya hidup dan berpola pikir Barat dan bisa mengikuti kemajuan peradaban Barat telah mengalahkan dan menguburkan semua nalar kritis mereka sebagai anak bangsa terjajah.

Bandingkan dengan Korea atau India misalnya, di mana kaum intelektual justeru menjadi pelopor gerakan yang membangkitkan harga diri di hadapan bangsa-bangsa lain, utamanya AS, Jepang dan negara-negara industri maju. Di India misalnya, pengaruh dan dampak negatif strategi penyesuaian Bank Dunia dan IMF menimbulkan gerakan protes di kalangan kelas terdidiknya, sehinga mereka membentuk organisasi seperti CAWBADIA (*Campaign Against the World Bank and Destructive International Aid*). Berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa bantuan asing dan intervensi asing adalah bagian tak terpisahkan dari struktur imperialisme modern.

India merupakan salah satu negara yang mendapat program bantuan dari IMF dan Bank Dunia melalui *structural adjustment programmes* (SAP). Dalam jangka waktu yang singkat setelah program berlangsung, perekonomian India

dikuasai oleh modal-modal asing, perusahaan-perusahaan asing dan sedikit modal-modal domestik, yang pada akhirnya menimbulkan kolonialisasi baru di India. IMF dan Bank Dunia memaksakan strategi-strategi penyesuaian dan pembangunannya hanya untuk melegitimasi tindakannya dengan menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM). Akibatnya Bank Dunia menjadi institusi yang tidak demokratis dan hanya menjadi fasilitator bagi kolonialisme baru kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik. Bank Dunia tidak berusaha untuk transparan dan bertanggung jawab dan tidak bersedia mengubah kebijakannya ke arah persamaan sosial dan ekologi yang lebih besar. Lebih parah lagi, mereka mengklaim sedang melakukan pembangunan yang berkelanjutan (Smitu Kothari, "Global Economic Institutions and Democracy: A View form India", dalam John Cavanagh, Daphne Wysham & Marcos Arruda (eds.), *Beyond Bretton Woods; Alternative to The Global economic Order*, London: Pluto Press, 1994, hlm. 39-42).

D. Pragmatisme Elit sebagai Ideologi Salah Paham

Pragmatisme yang mendasari pemikiran ekonom dan ilmuwan politik di Indonesia sehingga mereka rela bunuh diri ideologis juga disebabkan oleh kesalahpahaman mereka terhadap Barat. Sebagian besar kaum intelektual Indonesia (ilmuwan politik, ekonomi atau sejarawan misalnya) keliru dalam memahami sejarah peradaban Barat. Kemajuan dan keunggulan yang dicapai Barat saat ini dan

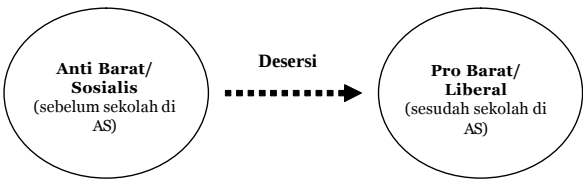

sebelumnya dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan dan akumulasi kapital, selalu dianggap sebagai hasil dari proses dinamika internal yang dibentuk melalui rekayasa dan kreativitas lokal. Karena itulah, pembangunan politik dan ekonomi di Indonesia (dan Dunia Ketiga pada umumnya) seharusnya mengikuti pola-pola Barat.

Asumsi seperti itu jelas suatu kesalahpahaman yang sangat nyata. Melihat kemajuan Barat semata sebagai sebuah substansi (yaitu hasil dari dinamika internal) – bukan dalam relasinya dengan Dunia Ketiga – adalah keliru secara fatal. Lebih dari itu, melihat Barat sebagai rujukan dan referensi yang paling ilmiah dan terbaik juga keliru, karena hal itu justeru menunjukkan adanya mentalitas permanen sebagai *inlander* yang sudah mendarah daging.

Kemajuan dan keunggulan Barat tidak bisa dilihat semata-mata sebagai prestasi mereka yang lahir dari dinamika internalnya, misalnya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu semua tidak ada gunanya, jika mereka tidak memiliki bahan mentah, pasar yang luas dan tenaga kerja yang murah. Kemajuan Barat dengan sendirinya dicapai dengan menjadikan Dunia Ketiga (Asia, Amerika Latin dan Afrika) sebagai wilayah eksploitasi. Barat maju karena pengorbanan keringat, darah dan harga diri manusia-manusia di Dunia Ketiga.

Hal seperti itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena penjajahan bangsa asing terhadap Indonesia, baik yang dilakukan oleh Portugis, Inggris, Belanda maupun Jepang, telah

menjadikan bangsa ini miskin dalam wujud yang sangat nyata, namun juga miskin pada level pemikiran dan semangat. Sumber daya alam Indonesia dikuras sepuas-puasnya oleh para penjajah, sehingga mereka saat ini hidup sejahtera. Pada saat yang sama, mentalitas penduduk Indonesia juga dibuat rendah, yaitu mentalitas buruh, bangsa tidak beradab, tradisional, dan harus mengikuti Barat jika ingin "naik kelas".

E. Elit sebagai Kelas Penikmat

Dari ketiga masalah di atas, maka jelaslah bahwa elit Indonesia bukanlah agen perubahan. Elit bukanlah pihak yang tepat untuk terus-menerus diberi kepercayaan "mengurusi" bangsa ini. Karena elit Indonesia hanyalah kelas penikmat (*leisured class*) yang secara mental tidak pernah mempunyai pemikiran besar selain hanya selalu mencari keuntungan dan kenikmatan di dalam berbagai situasi yang muncul dalam kehidupan bangsa. Bunuh diri ideologis, menjadi komprador dan bersikap pragmatis merupakan bagian dari upaya mencari keselamatan itu.

Mereka bisa bertahan sebagai kelas penikmat, karena secara sosial tidak punya basis massa

yang riil, secara ekonomi adalah kelas menengah dan secara budaya adalah *westernized*. Lebih dari itu, mereka juga beraliansi dengan tiran internasional.

Dalam nalar modernitas kaum elit itu, rakyat – apalagi yang di strata sosial bawah – diasumsikan tidak mungkin bisa merumuskan kepentingan mereka, apalagi kepentingan nasional. Yang berhak dan bisa merumuskan dan membuat kebijakan menyangkut kepentingan nasional hanyalah elit yang berpendidikan, modern dan beradab.

Itulah profil, sejarah dan watak dasar elit-elit Indonesia dari kalangan non-NU.

- 6 -

NU: JIMATNYA NKRI, JIMATNYA ISLAM

Catatan Penutup

Dalam sebuah tulisannya "Tradition and Modernity Reconsidered" (*Comparative Studies of Society and History*, No. 3 Vol. IX 1967), Reinhard Bendix menyatakan bahwa bisa saja modernisasi di negara-negara berkembang berlangsung tanpa menghasilkan modernitas.

Melihat fakta yang ada, dengan semangat yang sama, kita juga bisa mengatakan demokratisasi berlangsung secara massif di Indonesia selama ini tidak menghasilkan kultur politik yang sehat. Liberalisasi di bidang ekonomi tidak menghasilkan etos kewirausahaan, tetapi kultur konsumsi massal yang tak

terkendali. Modernisasi di bidang pemikiran keagamaan yang sudah berjalan lebih dari satu abad juga berlangsung tanpa menghasilkan kultur keberagamaan yang modern: santun, terbuka, toleran dan transformatif.

Dalam tradisi pemikiran NU, syariat Islam diturunkan kepada manusia tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk melindungi kepentingan dasar manusia itu sendiri, mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan di antara mereka. Untuk tujuan itu, para ulama di masa lampau merumuskan sebuah konsep yang dikenal dengan *maqashid as-syariah* atau tujuan-tujuan syariat

Dalam salah satu karya monumentalnya, *al-Mustasyfa* (Jilid I, hlm. 278), Al-Ghazali misalnya menyatakan tujuan syariat diturunkan kepada manusia adalah untuk melindungi lima hal, yaitu: (1) agama dan keyakinan, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan dan (5) harta atau hak milik pribadi. Dengan demikian, Islam dalam pandangan NU sangat melindungi kebebasan dan mendukung kemakmuran.

Karena itu, NU bisa dikatakan hampir tidak pernah mengeluarkan keputusan yang berisi fatwa sesat terhadap kelompok lain. Meski seorang

ulama sudah menyatakan bahwa suatu kelompok adalah sesat, ia tetap tidak bisa dan tidak dibenarkan untuk membubarkan kelompok yang dianggap sesat itu, karena itu memang bukan tugas ulama, tetapi tugas negara. Bahkan di negara Islam sekalipun.

Jika seorang ulama memfatwakan bahwa judi adalah haram, maka tugas ulama hanya sampai dalam batas menyampaikan dan memberi masukan kepada pemerintah. Jika ternyata pemerintah tidak menutup judi, maka tugas ulama adalah melakukan gerakan moral secara terus-menerus sampai judi ditutup, bukan kemudian menutup sendiri arena perjudian dengan cara-cara kekerasan.

Indonesia, dalam pandangan NU, masuk dalam ketegori negara damai (*dar as-sulh*). Dalam konsep negara damai, tidak ada satu pihak pun yang bisa memaksakan fatwa kepada umat, termasuk MUI. Karenanya, tidak perlu dilakukan upaya penawaran fatwa secara berlebih-lebihan dan demonstratif, karena akan muncul fatwa lain yang berseberangan atau sikap lain yang tidak difatwakan, seperti sikap diam masyarakat (Abdurrahman Wahid, 1989).

Lantas bagaimana NU menyikapi gerakan-gerakan yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah?

Dalam salah satu tulisannya berjudul "Kiai Khasbullah dan Musuhnya" (*Tempo*, 7 Juni 1980), Gus Dur bercerita tentang sosok Kiai Khasbullah yang luar biasa. Ia tipe kiai yang senang dengan keterus-terangan. Lugas dalam berbicara, teguh dalam sikap, berani melawan yang dianggap tidak benar. Menegakkan hukum agama adalah perjuangan hidupnya yang diabdikan untuk mengajar orang banyak di kampungnya.

Di desa sebelah Kiai Khasbullah waktu itu muncul gerakan baru bernama Darul Hadis yang kemudian dikenal dengan Islam Jamaah. Di tahun limapuluhan itu belum ada Majelis Ulama Indonesia sehingga tidak ada lembaga yang membuat fatwa tentang sesat tidaknya gerakan atau ajaran keagamaan baru. Sesuai dengan kelugasan seorang agamawan yang berpegang teguh pada keyakinan keagamaannya yang dianggap benar, Kiai Khasbulah kemudian menantang berdebat kelompok Darul Hadis tersebut.

Meski menang berdebat, Kiai Khasbullah tetap tidak melarang kelompok Darul Hadis. Namun toleransi ini ada batasnya, yaitu selama mereka tidak *tabligh* (menyebarkan ajaran) ke desa lain di sekitarnya, serta tidak membeli tanah di desa sekitarnya, Darul Hadis dibiarkan berkembang di desa tersebut. Kiai Khasbullah yang lugas dan keras ternyata menyimpan kearifan yang mendalam. Pertentangan pendapat tidak semuanya seharusnya diselesai-kan dengan melarang atau menyesatkan kelompok lain. Toleransi justeru bisa lebih membawa hasil, sebagai upaya menahan perluasan pengaruh lawan. Istilah politik luar negerinya *containment policy*.

Praktek seperti itu juga terjadi di Iran. Di negeri para mullah itu, kelompok Ahmadiyah diberi jatah kursi khusus di parlemen. Tetapi kursi itu boleh ditambah dan juga tidak akan pernah dikurangi. Apa yang dilakukan Kiai Khasbullah dan pemerintah Iran itu menegaskan bahwa hak hidup dan menjalan-kan ajaran agama yang diyakini merupakan hak dasar yang dijamin sepenuhnya oleh syariat.

Apa yang ditulis Gus Dur di atas bisa dikatakan sebagai inti padangan NU tentang kelompok

sempalan (*splinter group*). Cara-cara yang santun dan toleran dalam menyikapi kelompok yang dianggap sesat justeru lebih memungkinkan mereka bisa "kembali ke jalan yang benar". Kalau pun tidak, suasana kehidupan yang damai dan komunikasi yang secara terus-menerus dapat mematangkan dan mendinamisasi kehidupan keberagamaan umat itu sendiri.

Itulah kedalaman dan kearifan pandangan dunia NU yang – disadari atau tidak – telah menjadi pilar dan pengikat dasar tegaknya NKRI. Dan pandangan seperti itu akan terus berdiri kokoh dan mengakar jika NU diberi ruang gerak yang memadai dan proporsional dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. NU adalah garansi lestari dan tegaknya NKRI dan ideologi nasional Pancasila. NU adalah garansi tegaknya Islam yang toleran dan transformatif. NU adalah jimatnya NKRI, juga jimatnya Islam. Kalau NKRI sudah kehilangan jimatnya, maka kehancuran lah yang akan segera datang. Kalau Islam juga kehilangan jimatnya, maka aliran-aliran sesat lah yang bermunculan.

Karena itu, siapapun yang berkuasa di negeri ini, sudah seharusnya mempercayakan kepada NU jabatan-jabatan politik yang terkait dengan

kemaslahatan orang banyak dan tegaknya kultur dan ideologi nasional. Jabatan seperti Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pertanian, untuk menyebut beberapa contoh, adalah jabatan yang seharusnya menjadi "jatah wajib" NU, bukan semata-mata karena kontribusi NU yang luar biasa terhadap bangsa ini, tetapi sekaligus untuk menjamin agar kelangsungan hidup bangsa dan kemaslahatan umum bisa dijaga dengan konsisten.***

TENTANG PENULIS

Muh. Hanif Dhakiri adalah aktivis-politisi muda Nahdlatul Ulama (NU) yang berlatar belakang santri dan profesional sekaligus. Menjabat Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Sekretaris Fraksi PKB di DPR RI, Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa), dan Ketua Dewan Penasihat DENSUS 26. Pemilu 2009 mengantarkan lulusan IAIN Walisongo Salatiga ini sebagai anggota DPR RI mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah X (Kab/Kota Pekalongan, Pemalang dan Batang). Pada pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang, Hanif kembali ditugaskan PKB menjadi Calon Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan yang sama dengan Nomor Urut 1 (satu). Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) ini dikenal sebagai aktivis muda, pendamping masyarakat, konsultan, peneliti dan trainer di berbagai LSM dan kelompok masyarakat rentan. Pernah bekerja bersama Friedrich Nauman Stiftung (FNF) Jakarta dan terakhir di the National

Democratic Institute for International Affairs (NDI) Indonesia. Selama empat tahun terakhir sejak terpilih menjadi wakil rakyat pada Pemilu 2009 lalu, alumni Ponpes Sirojul Muhlasin Payaman Magelang, Ponpes Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta dan Ponpes Edi Mancoro Kab. Semarang ini memaksimalkan diri sebagai khodimul ummah (pelayan rakyat) bagi Keluarga Besar NU-PKB dan warga masyarakat di Daerah Pemilihannya. Disamping itu, ia tetap menjadi penulis lepas di beberapa media nasional dan daerah, serta telah menerbitkan sejumlah buku, kumpulan puisi dan naskah teater, juga buku ilmiah-populer dan buku-buku kaderisasi politik yang dipersembahkan untuk PKB.

Buku-bukunya yang telah terbit antara lain: *Menggagas Fiqh Perburuhan* (1999), *Paulo Freire, Islam dan Pembebasan* (2000), *Post-tradisionalisme Islam* (2000), *Politik Melayani Basis* (2001), *Menjadi Politisi Manajer* (2001), *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal* (2007), *Mengapa Memilih PKB?* (2008), *9 Alasan Mengapa Kiai-Kiai di Belakang Gus Dur* (2009), *41 Warisan Gus Dur* (2010) berikut edisi bahasa Inggrisnya *Gus Dur's Great Legacies* (2010) dan *Pedoman Berpolitik Warga NU* (2013).

N U
١٣٤٤
1926

نهضة العلماء
N U